



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DISPUSAKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



#bangga
melayani **BerAKHLAK**
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur pertama – tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi pemerintah dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai Pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan anggaran yang dibiayai dari APBD Tahun 2024, laporan kinerja ini disusun sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Palu, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah



M. EDHAR KHALID, S.Sos., M.A.P

Penyelia Tingkat I
NIP. 19731231 199403 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.2.1 Tugas dan Fungsi	7
1.2.2 Struktur Organisasi	8
1.3 Isu-isu Strategis	12
Dukungan SDM, Sarana Prasarana	22
1.3.1 Sumber Daya Manusia	22
1.3.2 Sarana Prasarana	28
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	38
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	38
2.1.1 Tujuan	38
2.1.2 Sasaran	38
2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	39
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	40
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	42
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	49
2.5 Perjanjian Kinerja	53



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja	55
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024	55
3.1.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	58
3.1.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	59
3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Target Nasional	61
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	63
3.1.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	63
3.2	Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP		76
4.1	Kesimpulan	85
4.2	Saran	86

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL I

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel I.2.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pangkat dan Golongan	23
Tabel I.3.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel I.4.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	24
Tabel I.5.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
Tabel I.6.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	25
Tabel I.7.	Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	26
Tabel I.8.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	26
Tabel I.9.	Jumlah Pegawai PPPK pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	26



Tabel I.10. Jumlah Pegawai PPPK pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pangkat dan Golongan	27
Tabel I.11. Jumlah Pegawai PPPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Tabel I.12. Jumlah Pejabat Fungsional PPPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin.....	28
Tabel I.13. Jumlah Pegawai PPPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	28

TABEL II

Tabel II.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”	41
Tabel II.2. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	42
Tabel II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	50
Tabel II.4. Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	54



TABEL III

Tabel III.1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024	55
Tabel III.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	58
Tabel III.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026	60
Tabel III.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	61
Tabel III.5. Tabel Analisis Sumber Daya dan Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	64
Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perpustakaan. Dengan kedudukan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Sebagai rencana pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan memberikan arah Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**.

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun



2024. Laporan ini merupakan bahan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan serta sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahun Anggaran 2024.

Eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan memberikan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

Potensi dari permasalahan pembangunan daerah pada umumnya adalah timbul dari adanya faktor internal maupun eksternal dimana kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan maupun tantangan yang tidak diantisipasi.

Kinerja pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode lima tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dicermati sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Identifikasi permasalahan urusan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja



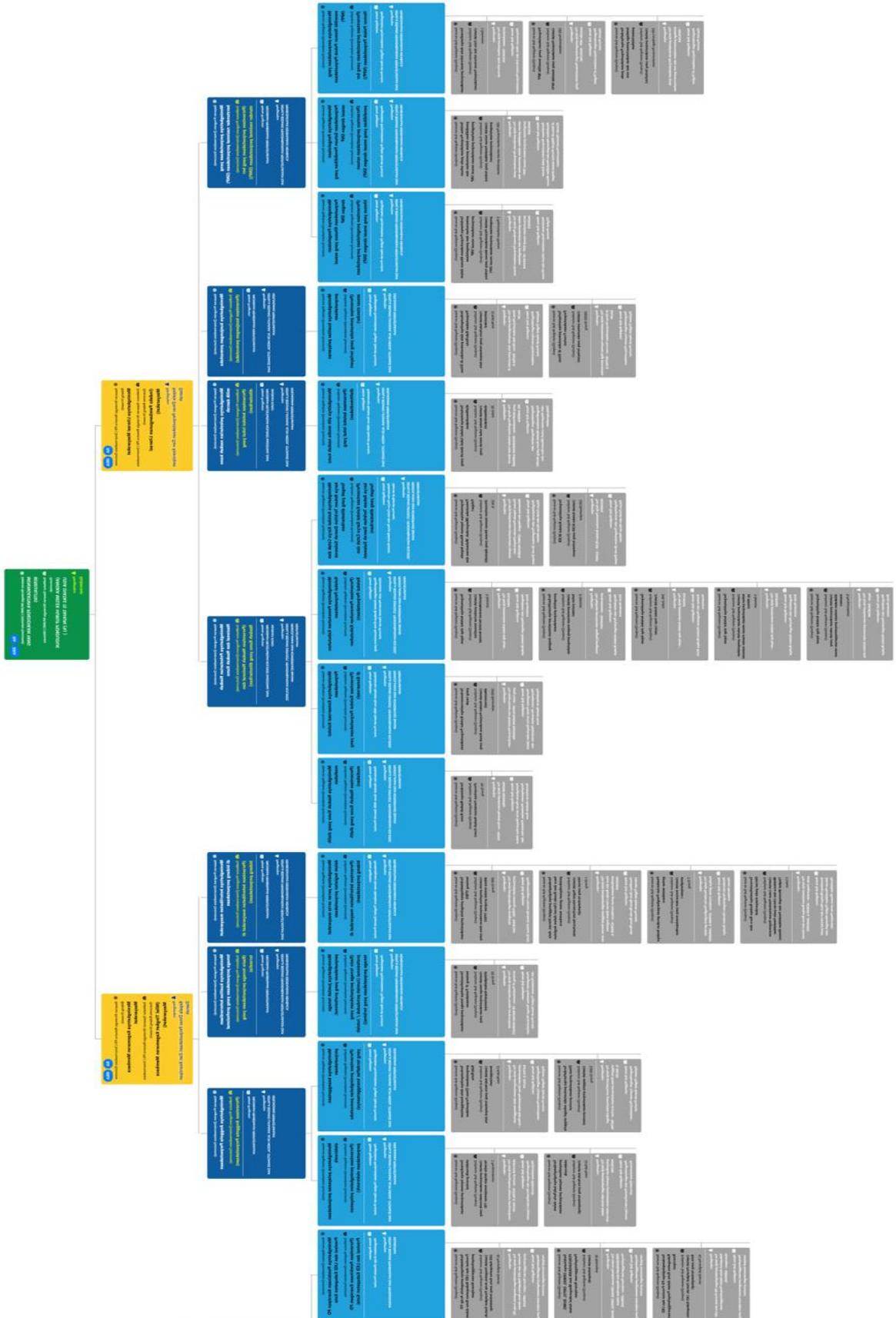
pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu diperpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka.
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.
4. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional implementasi di daerah tentang kegiatan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia baik APBD maupun APBN dalam upaya peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pembinaan semua jenis perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas.
7. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal.
8. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang Perpustakaan (Pustakawan) dan Kearsipan (Arsiparis).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

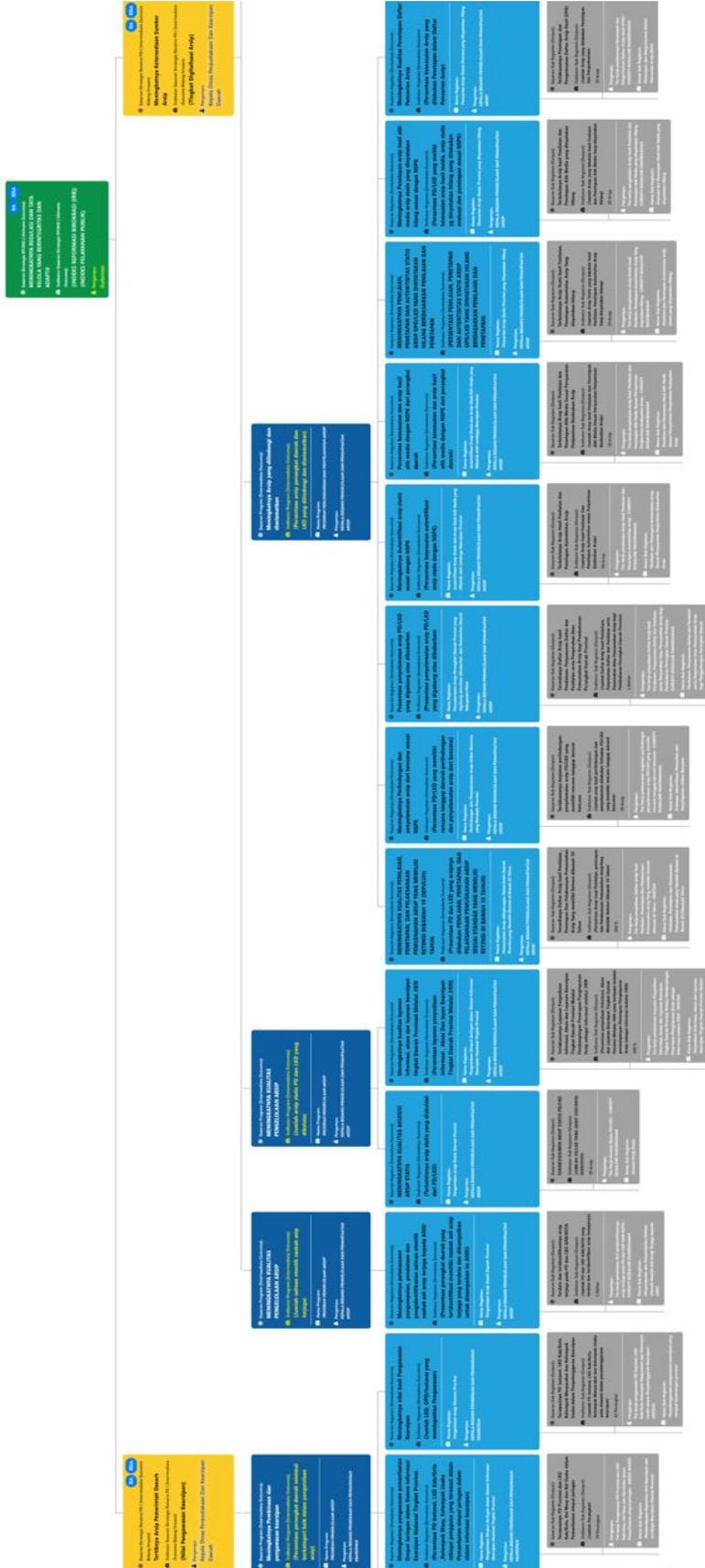
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Tahun 2024





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024





1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk karena adanya konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan kebudayaan



- kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diatas, maka Struktur Organisasi



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

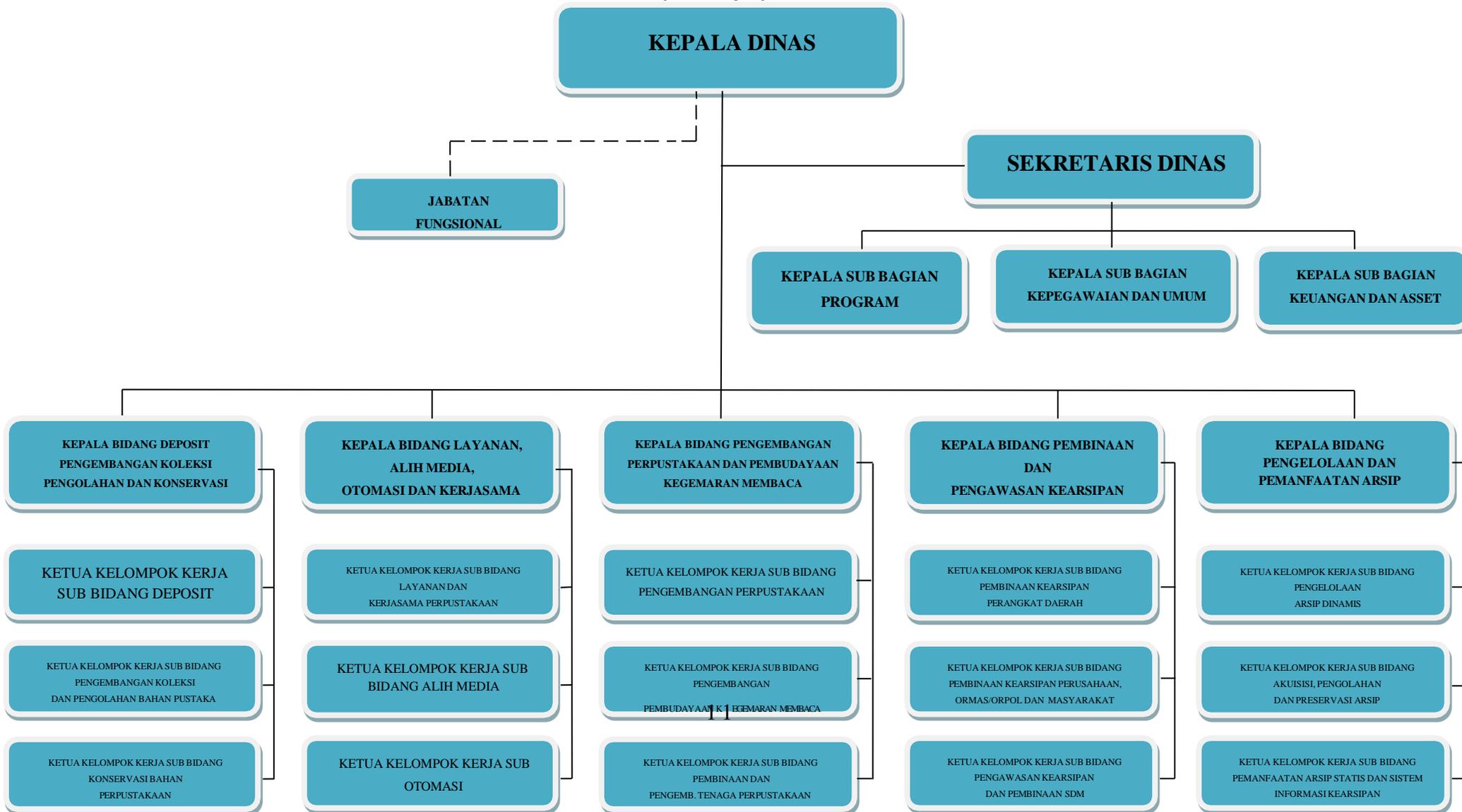
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan
 - a. Ketua Kelompok Kerja Sub.Bidang Deposit
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub.Bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub.Bidang Konservasi Bahan Perpustakaan
4. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
 - a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Alih Media
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Otomasi Perpustakaan
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca



- a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
- a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat.
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengawasan Kearsipan dan Pembinaan SDM
7. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip
- a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Sistem Informasi Kearsipan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Jabatan Fungsional Pustakawan
 - b. Jabatan Fungsional Arsiparis



STRUKTUR ORGANISASI (GAMBAR) (terlampir)





1.3 Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta pengelolaan kearsipan yang baik dan benar adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ingin dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan diterbitkannya undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diakomodir didalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sejalan dengan Reformasi birokrasi yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/ meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan



dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab padapembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis.

A. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga



menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Kaltim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.



Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis



pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkisah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

B. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomatisasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E-Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. ELibrary memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan. Merujuk dari perkembangan teknologi tersebut maka lahirlah iKaltim, sebuah sarana membaca yang memudahkan para pemustaka untuk membaca di manapun dan kapan saja. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Demikian pula hal berbicara tentang kearsipan peraturan perundangan tentang kearsipan masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu Dinas Perpustakaan Dan



Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap Perangkat Daerah. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap Perangkat Daerah, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakuisisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap Perangkat Daerah bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedangkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.



Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD.Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga pemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika setiap Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilai guna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi,



masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

C. Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno (Manuskrip)

Berdasarkan hasil survei/ riset UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Sementara itu, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hanya setingkat di atas Botswana (61).

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistis lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca.



Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu

Pemanfaatan layanan perpustakaan baru sebatas masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh secara geografis dari pusat kota seperti masyarakat urban, masyarakat pedesaan, perbukitan, maupun daerah perbatasan dan tertinggal lainnya masih termarginalisasi dalam akses sumber-sumber bacaan dan informasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu (1) daya beli masyarakat yang rendah terhadap bahan bacaan, (2) jumlah terbitan nasional terbatas setiap tahun, disamping pendistribusian yang tidak merata menjangkau komunal masyarakat, (3) keinginan atau minat masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan membaca dan menulis, serta (4) perpustakaan dalam memfasilitasi kebutuhan membaca belum tersedia secara maksimal.



Instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan perpustakaan serta diversifikasi layanan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap bacaan dan sumber informasi lainnya dapat diakses dengan cepat dan murah. Kebutuhan minimal perpustakaan di masyarakat ditinjau dari aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan memerlukan kurang lebih 794.023 perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekarang ini belum representatif. Salah satunya perpustakaan sekolah baru mencapai 5.74 % yang memiliki perpustakaan. Sedangkan perpustakaan masyarakat (perpustakaan kecamatan/ desa/ kelurahan/rumah ibadah) baru mencapai 0.28 % yang memiliki perpustakaan.

D. Kelembagaan Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, maka telah ditetapkan perpustakaan sebagai salah satu urusan wajib. Sehubungan dengan itu, sebagai urusan wajib bagi daerah otonom dalam hal pelayanan publik yang menunjang keberhasilan di bidang pendidikan maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, khususnya kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah telah terbentuk 13 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 13 Kab/Kota yang ada.



1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi memberikan dampak Perubahan Komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan serta arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan. Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 87 orang terdiri dari laki-laki 34 orang dan perempuan 53 orang. dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel I.1. Jumlah Pegawai PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	PNS	34	39.08	53	60.92	87



Tabel I.2. Jumlah Pegawai PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	I/a	-	-	-	-	-
2	I/b	-	-	-	-	-
3	I/c	-	-	-	-	-
4	I/d	-	-	-	-	-
5	II/a	2	2.30	-	-	2
6	II/b	2	2.30	1	1.15	3
7	II/c	6	6.90	1	1.15	7
8	II/d	1	1.15	-	-	1
9	III/a	5	5.75	2	2.30	7
10	III/b	4	4.60	6	6.90	10
11	III/c	4	4.60	14	16.09	18
12	III/d	4	4.60	17	19.54	21
13	IV/a	2	2.30	5	5.75	7
14	IV/b	4	4.60	4	4.60	8
15	IV/c	-	-	3	3.45	3
16	IV/d	-	-	-	-	-
17	IV/e	-	-	-	-	-
Total		34	39.10	53	60.93	87



Tabel I.3. Jumlah Pegawai PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/SMK	14	16.09	6	6.90	20
4	D.I	-	-	-	-	-
5	D.II	-	-	1	1.15	1
6	D.III	2	2.30	1	1.15	3
7	SI / D.IV	11	12.64	35	40.23	46
8	S2	7	8.05	10	11.49	17
9	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		34	39.08	53	60.92	87

Tabel I.4. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	ESS	FORMASI	TERISI	LOWONG	KETERANGAN
1	I.b	-	-	-	
2	II.a	-	-	1	
3	II.b	-	-	-	
4	III.a	6	6	-	
5	III.b	-	-	-	
6	IV.a	3	3	-	
TOTAL		9	9	1	



Tabel I.5. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ESS	PRIA	WANITA	JMLH	SDH PIM	BLM PIM	KETERANGAN
1	I.b	-	-	-	-	-	
2	II.a	-	-	-	-	-	
3	II.b	-	-	-	-	-	
4	III.a	2	4	6	6	-	
5	III.b	-	-	-	-	-	
6	IV.a	3	3	3	2	1	
TOTAL		5	7	9	8	1	

Tabel I.6. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	ESELON				JMLH
		I	II	III	IV	
1	SMA/SMK	-	-	-	-	-
2	D.I	-	-	-	-	-
3	D.II	-	-	-	-	-
4	D.III	-	-	-	-	-
5	SI / D.IV	-	-	4	1	5
6	S2	-	-	2	2	4
7	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	6	3	9



Tabel I.7. Jumlah Pejabat Fungsional PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	PUSTAKAWAN	3	13	16	-	3	3	19
2	ARSIPARIS	2	5	7	-	-	-	7
TOTAL		5	18	23	0	3	3	26

Tabel I.8. Jumlah Pegawai PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Struktural	3	6	9
2	Fungsional	5	21	26
3	Pelaksana	26	26	52
TOTAL		34	53	87

Tabel I.9. Jumlah Pegawai PPPK pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	PPPK	7	43.75	9	56.25	16



Tabel I.10. Jumlah Pegawai PPPK pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	VII	2	12.50	2	12.50	4
2	IX	5	31.25	7	43.75	12
Total		7	43.75	9	56.25	16

Tabel I.11. Jumlah Pegawai PPPK pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/SMK	-	-	-	-	-
4	D.I	-	-	-	-	-
5	D.II	-	-	-	-	-
6	D.III	2	12.50	2	12.50	4
7	SI / D.IV	5	31.25	7	43.75	12
8	S2	-	-	-	-	-
9	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		7	43.75	9	56.25	16



Tabel I.12. Jumlah Pejabat Fungsional PPPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	PUSTAKAWAN	-	2	2	-	-	-	2
2	ARSIPARIS	1	3	4	2	2	4	8
3	FUNGSI LAINNYA	4	2	6	-	-	-	6
TOTAL		5	7	12	2	2	4	16

Tabel I.13. Jumlah Pegawai PPPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Struktural	-	-	-
2	Fungsional	7	9	16
3	Pelaksana	-	-	-
TOTAL		7	9	16

1.4.2 Sarana Prasarana

Selain dari pada itu didukung pula sarana dan prasarana yang memadai seperti :

1. Gedung Perpustakaan dan Arsip yang representatif terdiri dari
 - a. Gedung Administrasi dan Layanan Perpustakaan



b. Gedung Pengolahan, Penyimpanan dan Layanan Informasi Arsip

2. Koleksi Perpustakaan

- a. Koleksi Umum : 73.034 judul 397.396 eks
- b. Koleksi deposit : 6.606 judul 9.561 eks

3. Perlengkapan Mobiler

4. Kendaraan Operasional

- a. Mobil Operasional (Perpustakaan Keliling) : 4 unit
- b. Mobil Layanan Arsip Keliling : 1 unit

5. Perlengkapan mobiler penunjang kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan seperti Rak Buku, Lemari Buku, Lemari Display, Perangkat Audio Visual, Peralatan Jaringan Sistem Otomasi Perpustakaan (e-Library), Meja dan Kursi Baca, Lemari Katalog, Lemari Penyimpanan Arsip, Box Arsip, Meja Sirkulasi, dll.

6. Ruang layanan yang representatif terdiri dari :

- a. Ruang Layanan Koleksi Anak-Anak
- b. Ruang Layanan Koleksi Digital dan Layanan IT
- c. Koleksi CD/DVD
- d. Layanan akses internet
- e. Layanan database on-line
- f. Layanan koleksi umum
- g. Layanan koleksi rujukan (referensi)
- h. Layanan koleksi deposit Sulawesi Tengah
- i. Layanan terbitan berkala (majalah, surat kabar, jurnal dll)
- j. Audio visual untuk pemutaran film, CD dan DVD



k. Diskusi/seminar/ pertemuan

l. Corner Sulawesi Tengah

7. Sarana Penelusuran Informasi terdiri dari :

a. Katalog on-line (OPAC = On-Line Public Access Catalogue)

b. Bibliografi Nasional dan Daerah

c. Katalog Induk Nasional dan Daerah

d. Abstrak (sari karangan)

8. Fasilitas Lainnya

a. Computer client dan hotspot : untuk akses internet dan akses koleksi CD/DVD

b. Armada Mobil Perpustakaan Keliling

c. Foto Copy : Melalui fasilitas ini koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dicopy sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan yang berlaku pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Klinik Pustakawan : Fasilitas ini merupakan sarana komunikasi dan informasi kepustakawanan

e. Ruang display buku baru

f. Mushola, kantin, toko koperasi, dan toilet

g. Pojok CSR (sarana bantuan dari beberapa pihak ketiga)

9. Pendayagunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk



masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari produk jasa layanan. Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut

a. Layanan Sirkulasi

Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.

b. Layanan Referensi

Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.

c. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital edutainment dalam format VCD/DVD.

d. Layanan Wisata Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukas.

e. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent

f. Layanan Informasi Koleksi Terbaru

Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam



bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

g. Bimbingan Pemakai.

Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.

h. Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA)

i. Pembuatan Sistem Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

j. Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif



k. Pembuatan SOP Kearsipan

Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

l. Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

m. Pembenahan/ Penataan Arsip/ Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembenahan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

n. Penyimpanan Arsip/ Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24 jam untuk Magnetic Tape, Catridge, CD-Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital;

o. Perawatan Arsip/Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip serta pengujian arsip konvensional;



p. Reproduksi Arsip/ Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

q. Alih Media Arsip/ Dokumen

layanann alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

r. Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

s. Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan informasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi.

t. Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti : Boks arsip, rak arsip, folder, guide, mikrofiche dll.



1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Rekomendasi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi sakip tahun 2024 terhadap permasalahan dalam pencapaian sasaran/kinerja organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi sulawesi tengah, yaitu :

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan, hal ini berdasarkan penetapan Rencana Aksi yang disusun tidak disertai jadwal pemantauan secara berkala.
2.	Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien karena belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.Masih Sebagian kecil pegawai memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Berdasarkan Pedoman Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang termuat pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa ; “Reviu dilakukan hanya atas Laporan Kinerja tingkat K/L/Pemda saja”.Masa/waktu dokumen belum mencapai 5 (lima) tahun dan belum terdapat upaya inovatif yang layak menjadi percontohan secara nasional.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

4.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none">a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan pada seluruh Bidang/Sub Bidangb. Belum ada kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong secara optimal peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah
----	------------------	--



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan– pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Terwujudnya pelayanan publik yang prima”**. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan **“Terwujudnya pelayanan publik yang prima”** Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan



sasaran strategis jangka menengah yang merupakan indikator pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang representatif.
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi.

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.



2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan



dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

Tabel II.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Meningkatnya Standar Pelayanan Publik	Mengembangkan layanan perpustakaan digital dan pembudayaan gemar membaca
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Yang Representatif			Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial
				Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyimpanan perawatan dan pelestarian naskah kuno
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Meningkatnya penciptaan arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengelolaan kearsipan baik	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi Kearsipan	Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan statis
					Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan



2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026. Pemenuhan persentase peningkatan minat baca masyarakat dan pemenuhan persentase OPD yang mengelola arsip daerah sesuai standart menjadi prioritas dalam mendukung terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 10. sebagai berikut:

Tabel II.2. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
				Rp	Rp	
1	2	3	4			18
		2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 27,161,626,349	Rp 26,803,512,512.23	Rp (358,113,837)
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca	2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

		2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 24,328,476,733	Rp 22,983,962,202	-Rp 1,344,514,530.77
		2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 302,751,100	Rp 403,501,150	Rp 100,750,050.00
		2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 268,135,850	Rp 353,805,850	Rp 85,670,000
		2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 9,999,700	Rp 17,565,950	Rp 7,566,250
		2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 10,901,600	Rp 15,915,350	Rp 5,013,750
		2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5,064,500	Rp 5,064,500	Rp -
		2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8,649,450	Rp 11,149,500	Rp 2,500,050
		2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14,462,187,388	Rp 12,734,219,765	Rp (1,727,967,623)
		2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14,246,627,388	Rp 12,518,599,765.23	Rp (1,728,027,623)
		2	23	01	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 25,000,000	Rp 10,000,000	Rp (15,000,000)
		2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 190,560,000	Rp 205,620,000	Rp 15,060,000
		2	23	01	1	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 157,729,750	Rp 215,859,750	Rp 58,130,000
		2	23	01	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp 50,100,000	Rp 50,100,000	Rp -
		2	23	01	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendali Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 17,869,750	Rp 17,869,750	Rp -
		2	23	01	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 89,760,000	Rp 147,890,000	Rp 58,130,000
		2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 34,745,000	Rp 34,745,000	Rp -



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

2	23	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 34,745,000	Rp 34,745,000	Rp -
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 650,315,400	Rp 706,034,310	Rp 55,718,910
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 164,376,610	Rp 185,459,360	Rp 21,082,750
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 35,356,240	Rp 48,033,900	Rp 12,677,660
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 26,345,000	Rp 26,345,000	Rp -
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 424,237,550	Rp 446,196,050	Rp 21,958,500
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1,188,123,290	Rp 1,283,525,590	Rp 95,402,300
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1,188,123,290	Rp 1,283,525,590	Rp 95,402,300
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,072,928,746	Rp 2,097,408,170	Rp 24,479,424
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 469,990,416	Rp 445,869,840	Rp (24,120,576)
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,602,938,330	Rp 1,651,538,330	Rp 48,600,000
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5,459,696,059	Rp 5,508,668,467	Rp 48,972,408
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 142,800,000	Rp 142,800,000	Rp -
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 125,550,000	Rp 125,550,000	Rp -
2	23	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 70,970,000	Rp 70,760,000	Rp (210,000)
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 5,080,372,059	Rp 5,071,772,059	Rp (8,600,000)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

		2	23	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 40,004,000	Rp 97,786,408	Rp 57,782,408
2.		2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 1,428,759,988	Rp 2,274,236,288	Rp 845,476,300
		2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 548,252,688	Rp 1,025,225,088	Rp 476,972,400
		2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 44,234,300	Rp 57,084,300	Rp 12,850,000
		2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp 50,048,110	Rp 191,601,710	Rp 141,553,600
		2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Rp 3,143,410	Rp 3,143,410	Rp -
		2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 69,580,300	Rp 153,260,300	Rp 83,680,000
		2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 242,265,080	Rp 339,535,080	Rp 97,270,000
		2	23	02	1.01	15	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 107,797,988	Rp 215,875,088	Rp 108,077,100
		2	23	02	1.01	16	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 31,183,500	Rp 64,725,200	Rp 33,541,700
		2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 880,507,300	Rp 1,249,011,200	Rp 368,503,900
		2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp 104,558,100	Rp 332,253,150	Rp 227,695,050



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

		2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp 70,997,600	Rp 70,997,600	Rp -
		2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 320,949,200	Rp 320,949,200	Rp -
		2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 384,002,400	Rp 524,811,250	Rp 140,808,850
		2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 454,249,780	Rp 454,175,874	Rp (73,906)
		2	23	03	1.01		Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Rp 135,936,403	Rp 135,939,700	Rp 3,297
		2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rp 135,936,403	Rp 135,939,700	Rp 3,297
		2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Rp 120,576,206	Rp 120,499,003	Rp (77,203)
		2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Rp 120,576,206	Rp 120,499,003	Rp (77,203)
		2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 197,737,171	Rp 197,737,171	Rp -
		2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp 197,737,171	Rp 197,737,171	Rp -
2	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip dan Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	2	24				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN			Rp -
		2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 799,483,100	Rp 940,951,400	Rp 141,468,300
		2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp 492,526,800	Rp 642,481,100	Rp 149,954,300



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	2	24	02	1.01	06	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Rp 175,968,000	Rp 175,949,100	Rp (18,900)
	2	24	02	1.01	05	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Rp 250,467,900	Rp 250,467,900	Rp -
	2	24	02	1.01	06	penciptaan dan pemeliharaan arsip dinamis	Rp 66,090,900	Rp 216,064,100	Rp 149,973,200
	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp 36,624,000	Rp 36,624,000	Rp -
	2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Rp 19,400,000	Rp 19,400,000	Rp -
	2	24	02	1.02	05	Akuisisi Arsip Statis	Rp 17,224,000	Rp 17,224,000	Rp -
	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp 270,332,300	Rp 261,846,300	Rp (8,486,000)
	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Rp 96,139,000	Rp 96,139,000	Rp -
	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp 174,193,300	Rp 165,707,300	Rp (8,486,000)
5.	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 150,656,748	Rp 150,186,748	Rp (470,000)
	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 26,994,848	Rp 26,524,848	Rp (470,000)
	2	24	03	1.01	01	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp 26,994,848	Rp 26,524,848	Rp (470,000)
	2	24	03	1.02		Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Rp 41,590,000	Rp 41,590,000	Rp -
	2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Rp 41,590,000	Rp 41,590,000	Rp -



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

		2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27,544,750	Rp 27,544,750	Rp -
		2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Rp 27,544,750	Rp 27,544,750	Rp -
		2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Rp 23,222,000	Rp 23,222,000	Rp -
		2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 17,724,000	Rp 17,724,000	Rp -
		2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 5,498,000	Rp 5,498,000	Rp -
		2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Rp 31,305,150	Rp 31,305,150	Rp -
		2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp 16,873,950	Rp 16,873,950	Rp -
		2	24	03	1.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Rp 4,999,500	Rp 4,999,500	Rp -
		2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp 9,431,700	Rp 9,431,700	Rp -
Jumlah								Rp 27,161,626,349	Rp 26,803,512,512.23	Rp (358,113,837)



2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menjalankan tugas Pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah. Sinkronisasi dan penyesuaian bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Indikator merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan capaian kinerja dalam suatu organisasi. Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan jika indikator tersebut akan diterapkan dalam pemberian rekomendasi pada program yang dijalankan. Kriteria indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok organisasi meliputi : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan. Mengingat program pembangunan bidang perpustakaan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik, maka indikator kinerja pada masing-masing unit program tidak sama.

Indikator kinerja utama pada masing-masing program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel II.3 berikut :



Tabel II.3. Tabel IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula/Rumus
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan Koleksi UPLM 3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan UPLM 4 = Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\frac{\sum_{i=1}^7 ALM_i^{UPLM_i}}{7} \times 100$ <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan Perpustakaan Nasional. Bagi Daerah yang belum memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.</p>



		<p>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat</p>	<p>Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti : frekwensi membaca perminggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan pertahun- Metode Survey tersebut diatas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :- Penetapan sampai (5 % dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi)- Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut :- Indikator Frekwensi Membaca- Indikator Durasi Membaca- Indikator Jumlah Bahan Bacaan- Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator diatas- Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---	--



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

2	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	<p>Rumus pengawasan arsip meliputi rencana pengawasan, laporan audit kearsipan internal (LAKI), dan program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT).</p> <p>Rencana pengawasan kearsipan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jadwal waktu pelaksanaan• Objek pengawasan• Prioritas• Anggaran• Jenis dan metode pengawasan• Langkah kerja <p>Laporan audit kearsipan internal (LAKI) disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal untuk setiap objek pengawasan.</p> <p>Program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT) merupakan rencana kegiatan pengawasan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.</p> <p>Dalam pengawasan arsip, terdapat beberapa prinsip etik yang harus dipatuhi, yaitu: Integritas, Obyektif, Kerahasiaan, Kompeten.</p>
3	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	<p>Digitalisasi arsip adalah proses mengubah arsip cetak menjadi format digital</p> <p>Tahapan digitalisasi arsip:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persiapan, seperti memilih dokumen yang akan diubah, pembersihan dokumen, dan memilih perangkat dan software2. Alih media, yaitu memindai dokumen dengan perangkat yang telah dipilih3. Editing, yaitu menyesuaikan hasil pemindaian agar kualitas gambar optimal4. Indeksasi, yaitu memberikan indeks dan metadata pada dokumen agar mudah ditemukan5. Penyimpanan, yaitu menyimpan arsip digital dalam database atau media penyimpanan yang aman6. Pembuatan Berita Acara



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. disebutkan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana dalam tabel.12 sebagai berikut:



Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Perpustakaan		
	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	65
		Kearsipan		
	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	80
	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	70

	Program		Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	22.983.962.202,23
2.	Pembinaan Perpustakaan	Rp	2.274.236.288,00
3.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	454.175.874,00
4.	Pengelolaan Arsip	Rp	940.951.400,00
5.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	150.186.748,00
J U M L A H		Rp	26.803.512.512,23



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja DISPUSAKA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Tahun 2024 dijabarkan pada tabel III.1.

Tabel III.1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Kategori
				TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
		Perpustakaan					
	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65	71,70	110,31	Sedang
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	65	67,48	103,82	Sedang
		Kearsipan					
	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	80	63,49	79,36	B (Baik)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persen	70	71,71	102,44	BB (Sangat Baik)
--	--	----------------------------	--------	----	-------	--------	-------------------------

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **71,70** dan masuk dalam **kategori Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Palu 91,10; Kab. Banggai Kepulauan 85,27; dan Kab. Toli Toli 72,18. Sedangkan tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Parigi Moutong 39,35; Kab. Banggai 43,37; dan Kab. Banggai Laut 46,69. Target di Tahun 2024 adalah 65 Indeks dan realisasi sebesar 71,70 sehingga capaian kinerja sebesar 110,31% yaitu sudah melewati capaian target.

Nilai TGM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **67,48** dan masuk dalam **sedang**. Tiga kabupaten/kota dengan nilai TGM tertinggi yaitu Kab. Banggai Kepulauan 75,89; Kab. Banggai Laut 73,95; dan Kota Palu 71,92. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan nilai TGM terendah yaitu Kab. Banggai 56,41; Kab. Morowali 60,53; dan Kab. Buol 63,71. Target di Tahun 2024 adalah 65 Indeks dan realisasi sebesar 67,48 sehingga capaian kinerja sebesar 103,82% yaitu sudah melewati capaian target.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar **63,49 (enam puluh tiga koma empat sembilan)** atau kategori **“B (Baik)”**. Target di Tahun 2024 adalah 80 Nilai dan realisasi sebesar 63,49 sehingga capaian kinerja sebesar 79,36% yaitu hampir mencapai target.



Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **71,71 (tujuh puluh satu koma tujuh satu)** dengan kategori **“BB (Sangat Baik)”**. Target di Tahun 2024 adalah 70 Nilai dan realisasi sebesar 71,71 sehingga capaian kinerja sebesar 102,44% yaitu sudah melewati capaian target.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Tahun 2022, 2023 dan 2024 dijabarkan pada tabel III.2.

Tabel III.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
		Perpustakaan										
	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13	13	100,00	13	13	100,00	65	71,70	110,31
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	63,3	60,50	95,58	65	63,95	98,38	65	67,48	103,82
		Kearsipan										
	Meningkatnya Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	100	94,98	94,98	100	94,00	94,00	80	63,49	79,36



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persen	20	18,43	92,15	30	26,36	87,87	70	71,71	102,4
--	----------------------------	--------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------

Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 rata-rata mengalami peningkatan seperti IPLM, TGM dan Digitalisasi Arsip. Realisasi IPLM Tahun 2022 dan 2023 yang semula 13 Indeks menjadi 65 Indeks di Tahun 2024 dan mengalami kenaikan capaian menjadi 110,31 Persen. Realisasi TGM Tahun 2022 dan 2023 yaitu 60,50 dan 63,95 mengalami kenaikan menjadi 67,48 dengan capaian sebesar 103,82 persen di Tahun 2024. Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dan 2023 yaitu 94,98 dan 94,00 dan agak menurun di tahun 2024 dengan realisasi 63,49 dan capaian kinerja 79,36%. Nilai Digitalisasi Arsip Tahun 2022 dan 2023 yaitu 18,43 dan 26,36 mengalami peningkatan menjadi 71,71 dengan capaian kinerja 102,44 Persen.

3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel III.3.



Tabel III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71,70	75	95,60
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,48	70	96,40
		Kearsipan			
	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	63,49	85	74,69
	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	71,71	80	89,63

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target akhir resntra yaitu IPLM realisasi Tahun 2024 sebesar 71,70 dan 2026 sebesar 75 sehingga tingkat kemajuan sudah mencapai 95,60%. Realisasi TGM Tahun 2024 Tahun yaitu sebesar 67,48 dan Tahun 2026 yaitu sebesar 70 sehingga tingkat kemajuan sudah mencapai 96,40%. Realisasi nilai pengawasan kearsipan yaitu 63,49 dan Tahun 2026 yaitu sebesar 85 sehingga tingkat kemajuan sudah mencapai 74,69%. Tingkat Digitalisasi Arsip yaitu sebesar 71,71 dan Tahun 2026 sebesar 80 sehingga tingkat kemajuan mencapai 89,63%.



3.1.4 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target nasional

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 dengan target nasional dijabarkan pada tabel III.4.

Tabel III.4. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	REALISASI 2024	TARGET STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71,70	73,52	97,52
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,48	72,44	93,15
		Kearsipan			
	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	63,49	80	79,36
	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	71,71	80	89,63



Responden yang digunakan dalam pengukuran IPLM adalah seluruh Dinas Perpustakaan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari pendataan Perpustakaan Nasional untuk keselarasan. Sedangkan kajian TGM adalah merupakan upaya mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan pembudayaan gemar membaca di tiap jenjang kewilayahan.

Pengukuran Nilai Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip berdasarkan hasil audit eksternal dengan bobot 60% dan audit internal 40%. Pada tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan outcome yang dihasilkan.

Nilai IPLM Povinsi Sulawesi Tengah sebesar 71,70 sedangkan Nilai IPLM Nasional Tahun 2024 sebesar 73,52 dengan capaian sebesar 97,52% dan masuk ke dalam kategori “Sedang”. Kategori “Sedang” menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat secara nasional sudah memenuhi standar dan berada dalam kategori sedang. Nilai ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu sebesar 15,00.

Nilai TGM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 67,48 sedangkan Nilai TGM Nasional Tahun 2024 sebesar 72,44 dengan capaian sebesar 93,15% sehingga masuk dalam kategori “sedang” untuk standar Nasional.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi



Tengah adalah sebesar **63,49 (enam puluh tiga koma empat sembilan)** atau kategori **“B (Baik)”**.

Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **71,71 (tujuh puluh satu koma tujuh satu)** dengan kategori **“BB (Sangat Baik)”**.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator untuk mencapai tujuan mewujudkan pelayanan publik yang prima ini didukung adanya program perpustakaan dan kearsipan dengan sasaran meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif yaitu perpustakaan bukan hanya sebagai tempat mencari referensi bahan bacaan oleh kalangan pelajar, mahasiswa maupun umum tetapi juga dapat menjadi sebuah tempat bagi kelompok, komunitas ataupun organisasi yang bergerak pada dunia literasi dalam melaksanakan kegiatan serta untuk bidang kearsipan yaitu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip provinsi yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan karna masalah penganggaran yang mungkin berlebih maupun kurang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai target.

3.1.6 Analisis Efisiensi Sumber Daya dan

Analisis efisiensi sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dijabarkan pada



tabel III.5.

Tabel III.5. Tabel Analisis Sumber Daya dan Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7 = 5/4*100	8 = 6/4*100
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 26,803,512,512	Rp 23,457,910,452	Rp 3,345,602,060	87.52	12.48
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp 25,712,374,364	Rp 22,430,734,564	Rp 3,281,639,800	87.24	12.76
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 22,983,962,202.23	Rp 19,760,604,484.87	Rp 3,223,357,717.36	85.98	14.02
2.		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 2,274,236,288	Rp 2,225,594,599	Rp 48,641,689	97.86	2.14
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 454,175,874	Rp 444,535,480	Rp 9,640,394	97.88	2.12
2	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip dan Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Rp 1,091,138,148	Rp 1,027,175,888	Rp 63,962,260	94.14	5.86
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 940,951,400	Rp 894,443,820	Rp 46,507,580	95.06	4.94
5.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 150,186,748	Rp 132,732,068	Rp 17,454,680	88.38	11.62



Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi diatas mencapai 14,02% atau setara dengan Rp. 19.760.604.484,87,- Efisiensi Program Pembinaan Perpustakaan mencapai 2,14% atau setara dengan Rp. 2.225.594.599,- Efisiensi Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mencapai 2,12% atau sebesar Rp. 444.535.480,- Efisiensi Program Pengelolaan Arsip mencapai 4,94% atau sebesar Rp. 894.443.820,- Efisiensi Program Perlindungan Penyelamatan Arsip mencapai 11,62% atau sebesar 132.732.068,-

3.1.7 Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kapasitas perpustakaan yang representatif dengan meningkatkan kegemaran membaca dan pembangunan literasi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip ini adalah sebanyak 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan Penyelamatan Arsip.

A. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama

Perpustakaan memiliki Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan merupakan dampak dari adanya intervensi yang dilakukan, baik oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maupun Dinas Perpustakaan Daerah. Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan



sebagai bentuk intervensi terhadap peningkatan jumlah koleksi perpustakaan antara lain:

- Program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu buku untuk perpustakaan desa/kelurahan dan TBM, dengan pemberian buku di setiap unit Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan dan TBM.
- Buku Siap Layan buku untuk Pojok Baca Digital, buku untuk Perpustakaan Komunitas, buku untuk perpustakaan keliling
- Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan pemberian buku siap layan
- Program Titik Baca dengan memberikan e-book (platform yang menyediakan buku digital untuk dibaca).
- Selain itu, Dinas Perpustakaan Daerah juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan melalui pembelian, hibah, tukar menukar dan terbitan sendiri (penerbitan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah untuk menambah koleksi perpustakaan).

B. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca memiliki Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) adalah perpustakaan yang sudah dibina sesuai dengan SNP dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi. Adapun jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP menurut jenis perpustakaan



sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Provinsi, Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap unit perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan intervensi secara langsung melalui pembinaan kepada unit perpustakaan berupa program Peningkatan Pendamping Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- Pemanfaatan Perpustakaan oleh Pemustaka Setiap perpustakaan memiliki layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka untuk memenuhi kebutuhan literasi dan informasi. Beragam kegiatan dapat dilakukan di perpustakaan, baik membaca buku, berdiskusi, maupun kegiatan lainnya. Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan menunjukkan pentingnya keberadaan perpustakaan bagi masyarakat. Berikut adalah diagram yang menggambarkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh pemustaka di setiap jenis perpustakaan
- Tenaga Perpustakaan Tenaga perpustakaan memerlukan peningkatan kapasitas diri agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para pemustaka. Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) berupa Bimtek, Workshop, dan juga tergabung dalam anggota organisasi profesi. Berikut



persentase tenaga perpustakaan dalam mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

C. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan memiliki Sasaran kegiatan sebagai berikut :

Koleksi perpustakaan memberikan gambaran terkait ketersediaan bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat. Oleh karena itu, ketercukupan koleksi perpustakaan menjadi Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat kedua dengan indikator berupa jumlah koleksi cetak dan digital dalam satuan judul yang dimiliki oleh perpustakaan.

D. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip memiliki Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 71,71 (tujuh puluh satu koma tujuh satu) dengan kategori “BB (Sangat Baik)”. Dalam kurun waktu RPJMN 2020-2024, kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. Sejak tahun 2021 kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi capaian kinerja berdasarkan hasil Audit Eksternal dengan bobot 60% dan Audit Internal 40%. Pada tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan outcome yang dihasilkan. Adapun gambaran



kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan memiliki Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan. Dalam mempercepat pelaksanaan SPBE, pengawasan kearsipan juga diperlukan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024. Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 63,49 (enam puluh tiga koma empat sembilan) atau kategori “B (Baik)”

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja DISPUSAKA Prov Sulteng tahun 2024 sebelum perubahan adalah Rp 27.161.626.349,00 dan setelah perubahan adalah Rp



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

26.803.512.512,23. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp 23.457.910.451,87 atau 87,52%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

a. Belanja Operasi

Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri atas :

- Belanja Pegawai dengan besaran anggaran Rp 12.707.419.765,23,00 terealisasi Rp 10.393.809.917,00 atau 81,89%.
- Belanja Barang dan Jasa dengan besaran anggaran Rp 8.305.199.148,00 terealisasi Rp 8.100.776.955,87 atau 97,54%.

b. Belanja Modal

Anggaran dalam Belanja Modal terdiri atas :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan besaran anggaran Rp 1.080.469.290,00 terealisasi Rp 1.077.880.000,00 atau 99,76%.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan besaran anggaran Rp 200.068.800,00 terealisasi Rp 196.950.000,00 atau 98,44%.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan besaran anggaran Rp 4.510.355.509,00 terealisasi Rp 3.673.493.579,00 atau 81,45%.

Silpa anggaran yang paling besar yaitu berasal dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.293.179.848,23 sehingga menjadi kurang maksimal disebabkan karena adanya pejabat struktural dan fungsional yang meninggal dan pensiun.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Silpa lainnya juga berasal dari belanja modal DAK yaitu pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp. 836.861.930,00 yang disebabkan sisa lelang, selebihnya adalah silpa dari perjalanan dinas yang menggunakan angkutan udara/pesawat. Diluar belanja pegawai dan modal, Realisasi untuk penunjang dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah 97,44% dimana semua kegiatan telah terlaksana.

Anggaran dan realisasi keuangan belanja tahun 2024 pada masing-masing program, kegiatan

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024 (Setelah Perubahan)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
		Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
2							
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 26,803,512,512.23		Rp 23,457,910,391
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				Rp. 2.728.412.162		Rp. 2.670.130.039
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	80	Rp 22,983,962,202	0.00	Rp 19,760,604,464.87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	Rp 403,501,150	0.00	Rp 391,400,688



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	Rp 353,805,850	4	Rp 342,067,938
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	2	Rp 17,565,950	2	Rp 17,556,350
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	2	Rp 15,915,350	2	Rp 15,779,150
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	2	Rp 5,064,500	2	Rp 5,056,100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Laporan	12	Rp 11,149,500	12	Rp 10,941,150
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Realisasi Anggaran	persen	100	Rp 12,734,219,765	100.00	Rp 10,435,039,917
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 12,518,599,765.23	12	Rp 10,225,419,917
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	Rp 10,000,000	2	Rp 10,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tercapainya Administrasi Keuangan yang Berkualitas	Dokumen	4	Rp 205,620,000	4	Rp 199,620,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Termanfaatkannya administrasi barang milik daerah	persen	100	Rp 215,859,750	100	Rp 209,887,030
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	Rp 50,100,000	2	Rp 46,027,100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendali Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	Rp 17,869,750	6	Rp 17,869,750
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	Rp 147,890,000	7	Rp 145,990,180



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 34,745,000	1	Rp 34,745,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	50	Rp 34,745,000	50	Rp 34,745,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	2	Rp 706,034,310	2	Rp 692,714,252
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4	Rp 185,459,360	4	Rp 185,459,360
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	5	Rp 48,033,900	5	Rp 48,033,900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	2	Rp 26,345,000	2	Rp 26,076,250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	15	Rp 446,196,050	15	Rp 433,144,742
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 1,283,525,590	1	Rp 1,274,830,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	11	Rp 1,283,525,590	11	Rp 1,274,830,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 2,097,408,170	1	Rp 2,080,644,677
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 445,869,840	12	Rp 438,691,985
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	Rp 1,651,538,330	12	Rp 1,641,952,692
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 5,508,668,467	1	Rp 4,641,342,901
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Unit	64	Rp 142,800,000	64	Rp 142,800,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Unit	60	Rp 125,550,000	60	Rp 124,241,735
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	Rp 70,760,000	68	Rp 70,760,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	Rp 5,071,772,059	3	Rp 4,205,754,757.87
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan dan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	2	Rp 97,786,408	2	Rp 97,786,408
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	NILAI	65	Rp 2,274,236,288	71.70	Rp 2,225,594,559
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatnya a Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	Rp 1,025,225,088	1	Rp 1,009,422,997
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	lembaga/pe rustakaan	1	Rp 57,084,300	33	Rp 54,189,000
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina sesuai SNP	lembaga/pe rustakaan	60	Rp 191,601,710	170	Rp 188,251,710
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah perpustakaan khusus yang mendapatkan pembinaan	lembaga/pe rustakaan	1	Rp 3,143,410	1	Rp 3,143,410
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang mendapatkan bimtek	Orang	5	Rp 153,260,300	5	Rp 150,788,557



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	layanan	4	Rp 339,535,080	6	Rp 334,305,960
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan manajemen tik	Perpustakaan	15	Rp 215,875,088	10	Rp 214,041,660
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	Rp 64,725,200	1	Rp 64,702,700
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca, Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan memberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	persen	83.3	Rp 1,249,011,200	80.00	Rp 1,216,171,562
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus	Lokus	1	Rp 332,253,150	3	Rp 315,914,235
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan	Orang	7	Rp 70,997,600	5	Rp 65,963,980
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Perpustakaan	11	Rp 320,949,200	52	Rp 315,156,740
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca/bunda baca/bunda literasi tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	Rp 524,811,250	1	Rp 519,136,607
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65	Rp 454,175,874	67.48	Rp 444,535,480



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Termanfaatkannya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Literatur	220	Rp 135,939,700	228	Rp 130,720,146
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR Yang di himpun dan dikelola serta kepatuhan serah simpan KCKR	Literatur	220	Rp 135,939,700	228	Rp 130,720,146
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Persen	80	Rp 120,499,003	80.00	Rp 116,770,163
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Buku Rusak yang di konservasi	orang	67	Rp 120,499,003	1503	Rp 116,770,163
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	Rp 197,737,171	1541	Rp 197,045,171
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh perpustakaan daerah tingkat provinsi	Eksemplar	625	Rp 197,737,171	1541	Rp 197,045,171
Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN				Rp. 1.091.138.148		Rp. 1.027.175.888
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik”	Persen	23	Rp 940,951,400	23	Rp 894,443,820
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Laporan	23	Rp 642,481,100	23	Rp 606,503,720
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi	instansi	60	Rp 175,949,100	60	Rp 174,819,100
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	laporan	0	Rp -	0	Rp -



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	jumlah arsip yang di alihmediakan dan di autentifikasi	arsip	1600	Rp 250,467,900	122	Rp 227,871,660
	penciptaan dan pemeliharaan arsip dinamis	jumlah daftar arsip dinamis	arsip	1600	Rp 216,064,100	21759	Rp 203,812,960
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah	%	100%	Rp 36,624,000	100%	Rp 31,133,800
	Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	arsip	35	Rp 19,400,000	15	Rp 14,256,000
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip	235	Rp -	0	Rp -
	Akuisisi Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi	arsip	235	Rp 17,224,000	153	Rp 16,877,800
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip dan LKD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar	persen	14	Rp 261,846,300	14	Rp 256,806,300
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN	Pengguna	300	Rp 96,139,000	285	Rp 95,649,000
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi	laporan	60	Rp 165,707,300	60	Rp 161,157,300
Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	Persen	40	Rp 150,186,748	40	Rp 132,732,068
	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Laporan	2	Rp 26,524,848	2	Rp 24,182,828
	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip hasil Penilaian, penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Arsip	470	Rp 26,524,848	30078	Rp 24,182,828



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

	Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	persen	19	Rp 41,590,000	19	Rp 38,035,000
	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip hasil Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	200	Rp 41,590,000	50	Rp 38,035,000
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persen	61	Rp 27,544,750	61	Rp 23,750,000
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip hasil Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	6	Rp 27,544,750	1	Rp 23,750,000
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Laporan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Laporan	2	Rp 23,222,000	2	Rp 20,998,000
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Hasil Penilaian Dan Penetapan Autentisitas sesuai Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	470	Rp 17,724,000	153	Rp 15,598,000
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip hasil Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Daftar	450	Rp 5,498,000	50	Rp 5,400,000
	Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	Laporan	1	Rp 31,305,150	1	Rp 25,766,240
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis hasil Penilaian, Penetapan Autentisitas Arsip Yang dinyatakan hilang	Arsip	125	Rp 16,873,950	0	Rp 15,546,240



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip hasil Evaluasi dan Penetapan Alih Media Yang dinyatakan Hilang	Daftar	125	Rp 4,999,500	0	Rp 4,500,000
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip Yang dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	Daftar	125	Rp 9,431,700	0	Rp 5,720,000
Jumlah			66	Rp 26,803,512,512.23	87.52	Rp 23,457,910,391.87

Berdasarkan data realisasi penyerapan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 23.457.910.391,87,- (87,52%).

Tingkat penyerapan DPA tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi anggaran cukup efisien dalam pelaksanaan anggaran terhadap capaian keluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1 Kesimpulan

Secara garis besar, pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2024 telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2024 yang mencapai 87,52 %. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan sebagaimana diuraikan di Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 telah berhasil melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada TA 2024 dengan anggaran akhir sebesar Rp. 23.457.910.391,87,-



4.2 Saran

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada cara kita memperoleh dan membagikan informasi. Pun perilaku pencarian informasi oleh pengguna layanan informasi juga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini menjadikan tantangan bagi perpustakaan di era digital semakin banyak. Agar perpustakaan tetap eksis sesuai dengan kemajuan teknologi, maka harus mampu berinovasi dan mengembangkan diri. Salah satunya adalah dengan membangun perpustakaan digital.

iPerpusSulteng adalah platform perpustakaan digital yang hadir sebagai upaya untuk membuat pemustaka dapat memperoleh akses informasi dengan lebih cepat dan mudah ke berbagai sumber informasi tanpa terikat oleh batasan geografis atau waktu. Akses *iPerpusSulteng* dapat menggunakan perangkat elektronik seperti tablet atau ponsel pintar sehingga lebih fleksibel bagi pemustaka dengan mobilitas tinggi. Dengan *iPerpusSulteng* pemustaka dapat mengakses ratusan judul koleksi perpustakaan digital kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat penting di era dimana mobilitas dan keterhubungan digital menjadi kunci untuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat modern.

Langkah selanjutnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan. Kendala-kendala seperti *human error*, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2025.



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024*

Demikian LKIP ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan sehingga terciptanya kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. NOVALINA, MM

Jabatan : Pjs. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2024

Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah



Dra. NOVALINA, MM

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231199403 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65 %
		- Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	65 %
2.	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	80%
3.	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	70 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.274.236.288.00	APBD
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 454.175.874.00	APBD
3. Pengelolaan Arsip	Rp. 940.951.400.00	APBD
4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 150.186.748.00	APBD
5. Perpustakaan dan Literasi / Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Rp. 340.587.000.00	APBN

Palu , Oktober 2024

Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah



Dra. NOVALINA, MM

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEONG MAKALALAG, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
NIP. 19640919 199003 1 009

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah


KEONG MAKALALAG, S.Sos.
NIP. 19680907 199403 2 010



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024
Sekretariat**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan</p> <p>Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan</i> - <i>Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> - <i>Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> - <i>Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> - <i>Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> <p>Meningkatnya penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN</i> - <i>Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> - <i>Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun SKPD</i> <p>Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i> - <i>Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i> - <i>Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang</i> 	<p>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)</p> <p>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> - <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> - <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> - <i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> <p>Persentase penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangannya</i> - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> - <i>Jumlah Laporan semester dan akhir tahun</i> <p>Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i> - <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i> - <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan</i> 	<p>66 Indeks</p> <p>95 Nilai</p> <p>4 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p> <p>2 Laporan</p> <p>2 Laporan</p> <p>90 %</p> <p>12 Bulan</p> <p>2 Dokumen</p> <p>4 Laporan</p> <p>90 %</p> <p>2 Laporan</p> <p>6 Laporan</p> <p>7 Laporan</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Milih Daerah pada SKPD</i>	<i>Barang Milih Daerah pada SKPD</i>	
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN Perangkat Daerah	90 Indeks
	- <i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	- <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	6 Orang
	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	90 Indeks
	- <i>Tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan kantor</i>	- <i>Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	4 Paket
	- <i>Tersedianya komponen peralatan rumah tangga</i>	- <i>Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga</i>	5 Paket
	- <i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	- <i>Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan</i>	2 Paket
	- <i>Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	- <i>Jumlah rakor dan konsultasi yang diselenggarakan</i>	7 Laporan
	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Pengadaan barang dan Jasa Perangkat Daerah	90 Indeks
	- <i>Tersedianya peralatan dan mesin lainnya</i>	- <i>Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	8 Unit
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4 Indeks
	- <i>terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	- <i>jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan</i>	2 Laporan
	- <i>Terlaksananya Pelayanan Umum kantor yang disediakan</i>	- <i>jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan</i>	3 Laporan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4 Indeks
	- <i>Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan</i>	- <i>Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan</i>	16 Unit
	- <i>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	- <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	20 Unit
	- <i>Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	- <i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	68 Unit
	- <i>Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	- <i>jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	2 Unit
	- <i>Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	- <i>Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	2 Unit

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 24.328.476.733,00
Kegiatan	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 302.751.100,00
Sub Kegiatan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 268.135.850,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 9.999.700,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 10.901.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.064.500,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.649.450,00
Kegiatan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14.462.187.388,00
Sub Kegiatan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14.246.627.388,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 25.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 190.560.000,00
Kegiatan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 157.729.750,00
Sub Kegiatan	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp 50.100.000,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 17.869.750,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 89.760.000,00
Kegiatan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 34.745.000,00
Sub Kegiatan	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 34.745.000,00
Kegiatan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 650.315.400,00
Sub Kegiatan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 164.376.610,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 35.356.240,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 26.345.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 424.237.550,00
Kegiatan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.188.123.290,00
Sub Kegiatan	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.188.123.290,00
Kegiatan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.072.928.746,00
Sub Kegiatan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 469.990.416,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.602.938.330,00
Kegiatan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.459.696.059,00
Sub Kegiatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 142.800.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 125.550.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 70.970.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 5.080.372.059,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 40.004.000,00



Palu, 13 Juni 2024
Sekretaris
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah,

Keong Makalalag, S.Sos.
NIP. 19680907 199403 2 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELLY EVY LEMBAH, S.Sos, M. Adm. KP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : KEONG MAKALALAG, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



KEONG MAKALALAG, S.Sos.
NIP. 19680907 199403 2 010

Kepala Sub Bagian Program

HELLY EVY LEMBAH, S.Sos, M. Adm. KP
NIP. 19671202 198601 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<p>Terlaksananya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <p>Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Termanfaatkannya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Termanfaatkannya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Termanfaatkannya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Tersedianya Jsa pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	<p>Jumlah Dokumen SKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan <p>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan <p>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 	<p>1 Dokumen</p> <p>6 Orang</p> <p>4 Dokumen</p> <p>4 Paket</p> <p>5 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>7 Laporan</p> <p>1 laporan</p> <p>8 Unit</p> <p>2 laporan</p> <p>2 Laporan</p> <p>3 Laporan</p> <p>5 Laporan</p> <p>16 Unit</p> <p>20 Unit</p> <p>68 Unit</p> <p>2 Unit</p> <p>2 Unit</p>

	Anggaran	Keterangan
Kegiatan		
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 34.745.000,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 34.745.000,00	APBD
Kegiatan		
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 650.315.400,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 164.376.610,00	APBD
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 35.356.240,00	APBD
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 26.345.000,00	APBD
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 424.237.550,00	APBD
Kegiatan		
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.188.123.290,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.188.123.290,00	APBD
Kegiatan		
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.072.928.746,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 469.990.416,00	APBD
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.602.938.330,00	APBD
Kegiatan		
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.459.696.059,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 142.800.000,00	APBD
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 125.550.000,00	APBD
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 70.970.000,00	APBD
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 5.080.372.059,00	APBD
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 40.004.000,00	APBD

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum



KEONG MAKALALAG, S.Sos.
NIP. 19680907 199403 2 010

HELLY EVY LEMBAH, S.Sos, M. Adm. KP
NIP. 19671202 198601 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD DAVID, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : KEONG MAKALALAG, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



KEONG MAKALALAG, S.Sos.
NIP. 19680907 199403 2 010

Kepala Sub Bagian Program

MOHAMMAD DAVID, S.Sos
Nip. 19751017 200701 1 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<p>Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD - Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<p>12 Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 302.751.100,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 268.135.850,00	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 9.999.700,00	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 10.901.600,00	APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5.064.500,00	APBD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.649.450,00	APBD

Palu , 13 Juni 2024

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



KEONG MAKALALAG, S.Sos.

NIP. 19680907 199403 2 010

Kepala Sub Bagian Program

MOHAMMAD DAVID, S.Sos

NIP. 19751017 200701 1 020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAWATI ,S.Sos., M.A.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : KEONG MAKALALAG, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



KEONG MAKALALAG, S.Sos.
NIP. 19680907 199403 2 010

Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Asset

RAHMAWATI, S.Sos., M.A.P
Nip. 19741008 200903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Dokumen
		- Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
		- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD. - Terlaksananya Rekonsiliasi dan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Laporan
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	3 Laporan
		- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan
		- Jumlah laporan hasil pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan
		- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan

	Anggaran	Keterangan
Kegiatan		
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 14.462.187.388,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 14.246.627.388,00	APBD
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 25.000.000,00	APBD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 190.560.000,00	APBD
Kegiatan		
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 157.729.750,00	APBD
Sub Kegiatan		
1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 50.100.000,00	APBD
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 17.869.750,00	APBD
3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 89.760.000,00	APBD

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



KEONGKALALAG, S.Sos.

NIP. 19680907 199403 2 010

Palu, 13 Juni 2024
Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Asset

RAHMAWATI, S.Sos., M.A.P

NIP. 19741208 200902 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG EKO PURWOKO, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerja Sama
Perpustakaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi
dan Kerja Sama Perpustakaan


AGUNG EKO PURWOKO, S.Sos.
NIP. 19760816 200003 1 003



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

**BIDANG LAYANAN, ALIH MEDIA, OTOMASI DAN
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Meningkatnya kunjungan pemustaka</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terlayannya pemustaka di Dinas Perpustakaan Provinsi</i> - <i>Terkumpulnya data pemustaka di Dinas Perpustakaan Kab/Kota</i> 	<p>Rasio kunjungan pemustaka</p> <p>Persentase pemustaka yang terlayani sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah pemustaka yang terlayani</i> - <i>Jumlah kab/kota yang terkumpul data pemustaka</i> 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>28500 Orang</p> <p>13 Kab/Kota</p>
2	<p>Meningkatnya Anggota Perpustakaan</p> <p>Meningkatnya keanggotaan perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terdaftaranya pemustaka sebagai anggota Dinas perpustakaan provinsi</i> - <i>Terkumpulnya data keanggotaan perpustakaan Dinas Perpustakaan Kab/Kota</i> <p>Meningkatnya pelayanan perpustakaan elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tersedianya layanan perpustakaan elektronik provinsi</i> - <i>Terdampinginya kab/kota dalam penyediaan layanan perpustakaan elektronik</i> 	<p>Persentase pemustaka yang terdaftar keanggotaanya</p> <p>Jumlah anggota perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah promosi perpustakaan</i> - <i>Jumlah kab/kota yang terkumpul data keanggotaan</i> <p>Jumlah anggota perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah perpustakaan elektronik yang tersedia dengan manajemen TIK</i> - <i>Jumlah kab/kota yang terdampingi</i> 	<p>100 %</p> <p>5 %</p> <p>1.300 Orang</p> <p>13 Kab/Kota</p> <p>100 %</p> <p>1 Perpustakaan</p> <p>13 Kab/Kota</p>

Program	Anggaran
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 286.499.380,00
Kegiatan	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 286.499.380,00
Sub Kegiatan	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 44.234.300,00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 242.265.080,00
Program	
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 120.576.206,00
Kegiatan	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Rp. 120.576.206,00
Sub Kegiatan	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Rp. 120.576.206,00

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I Nyoman Sriadijaya, M.M.
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang
Layanan, Alih Media, Otomasi Dan Kerja sama
Perpustakaan



Agung Eko Purwoko, S.Sos
NIP. 19760816 200003 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan
dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

MUH. IDHAM KHALID, S.Sos. M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 010



PERJANJIAN KINERJA ESELON III DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

No 1	Sasaran 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	<p>Meningkatnya perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan (SNP).</p> <p>1. Meningkatkan perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Terdaftar nya Perpustakaan pada lembaga pemerintahan dan non pemerintahan ◆ Perpustakaan yang memiliki NPP ◆ Tersedianya data informasi perpustakaan <p>2. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Satuan Pendidikan yang sesuai dengan SNP</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Terbina Perpustakaan pada satuan pendidikan dalam pemenuhan dan pengelolaan perpustakaan sesuai SNP <p>3. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Khusus yang sesuai dengan SNP</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Terbinanya Perpustakaan khusus dalam pemenuhan dan pengelolaan perpustakaan sesuai SNP <p>4. Meningkatkan perpustakaan yang terakreditasi.</p>	<p>Persentase perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan (SNP)</p> <p>persentase perpustakaan yang ber Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)</p> <p>Persentase perpustakaan yang Terdaftar</p> <p>Jumlah Perpustakaan yang memiliki NPP</p> <p>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</p> <p>Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang sesuai dengan SNP</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang terbina pengelolaan perpustakaan</p> <p>Persentase pengelolaan perpustakaan khusus yang sesuai dengan SNP</p> <p>Jumlah Perpustakaan khusus yang terbina pengelolaan perpustakaan sesuai SNP</p> <p>Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi</p>	<p>47,82 %</p> <p>55,59 %</p> <p>100 Lembaga Perpustakaan</p> <p>200 Perpustakaan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>22,39 %</p> <p>200 Perpustakaan satuan pendidikan</p> <p>22,39 %</p> <p>8 Perpustakaan Khusus</p> <p>50 Perpustakaan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	<p>Meningkatnya keterlibatan masyarakat di bidang perpustakaan</p> <p>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tersosialisasinya Budaya Baca dan literasi pada masyarakat ◆ Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ◆ Terbimbingnya pengelola perpustakaan tentang TPBIS ◆ Terdampinginya penggiat literasi, duta baca dan Bunda Literasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca <p>Meningkatnya kualitas ketersediaan tenaga perpustakaan yang profesional</p> <p>Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan yang profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tersosialisasinya tenaga perpustakaan tentang JF Pustakawan 	<p>Persentase keterlibatan masyarakat di bidang perpustakaan</p> <p>Presentase peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</p> <p>Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi budaya baca dan literasi.</p> <p>Jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan.</p> <p>Jumlah pengelola perpustakaan desa yang dibina melalui program TPBIS</p> <p>Jumlah Pegiat literasi/Duta Baca/bunda literasi yang terdampingin</p> <p>Persentase tenaga perpustakaan yang tersedia</p> <p>Persentase tenaga perpustakaan yang profesional</p> <p>Jumlah tenaga perpustakaan yang mendapatkan sosialisasi</p>	<p>60 %</p> <p>100 %</p> <p>100 Orang</p> <p>6 Orang</p> <p>300 Orang</p> <p>320 Orang</p> <p>'1:7390 Rasio</p> <p>10 %</p> <p>50 Orang</p>

Program	Anggaran
Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.078.697.320,00
Kegiatan	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 198.189.620,00
Sub Kegiatan	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 44.234.300,00
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp. 50.048.110,00
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Rp. 3.143.410,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 69.580.300,00
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp. 31.183.500,00
Kegiatan	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 880.507.300,00
Sub Kegiatan	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp. 104.558.100,00
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca	Rp. 70.997.600,00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp. 320.949.200,00
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 384.002.400,00

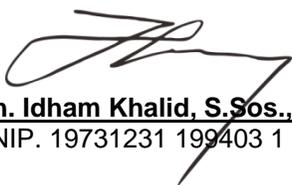
Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I Nyoman Sriadijaya, M.M.
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca



Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ARIANI, SE, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang Deposit, Pengembangan
Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan
Perpustakaan

ANDI ARIANI, SE, M.Si.
NIP. 19720414 199903 2 011



PERJANJIAN KINERJA ESELON III DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Dan Konservasi Bahan Perpustakaan

No 1	Sasaran 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	<p>Meningkatnya Pelestarian Naskah Nasional dan Naskah Kuno</p> <p>Meningkatnya Koleksi Karya Cetak dan karya Rekam Terbitan Daerah Sulawesi Tengah yang dilestarikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Koleksi KCKR - Terpenuhinya layanan Khusus kepada Pemustaka <p>Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Koleksi Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya koleksi siap layan <p>- Terfasilitasinya permintaan magang pengelola perpustakaan</p> <p>Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Koleksi Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkonservasinya Koleksi Perpustakaan yang rusak 	<p>Persentase Naskah Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan</p> <p>Persentase Koleksi Karya Cetak dan karya Rekam Terbitan Daerah Sulawesi Tengah yang dilestarikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koleksi Yang di Lestarikan - Persentase layanan khusus yang dipenuhi <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koleksi Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koleksi Siap Layan - Terbinanya Perpustakaan Sekolah Pengolahan Bahan Perpustakaan sesuai dengan standar nasional - Jumlah pemberian konsultasi kepustakawanan bersifat konsep - Jumlah perpustakaan sekolah yang dilakukan evaluasi penyelenggaraan sesuai standar - Jumlah permintaan magang pengolahan bahan pustaka <p>Persentase Koleksi Perpustakaan yang di Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koleksi Perpustakaan Rusak yang dikonservasi 	<p>100 %</p> <p>32 %</p> <p>100 Eks</p> <p>100 %</p> <p>39 %</p> <p>546 Judul 5 Sekolah</p> <p>5 Orang</p> <p>5 Perpustakaan</p> <p>5 Sekolah</p> <p>100 %</p> <p>1000 Eksemplar</p>

Meningkatnya Naskah Kuno yang dialih mediakan	Persentase Naskah Kuno yang dialih mediakan	100 %
- Terpenuhinya koleksi siap layan	- Terdatanya Naskah Kuno	100 %

Program	Anggaran
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 454.249.780,00
Kegiatan	
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Rp. 135.936.403,00
Sub Kegiatan	
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rp. 135.936.403,00
Kegiatan	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Rp. 120.576.206,00
Sub Kegiatan	
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Rp. 120.576.206,00
Kegiatan	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan	Rp. 197.737.171,00
Sub Kegiatan	
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp. 197.737.171,00

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I Nyoman Sriadijaya, M.M.
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang
Deposit, Pengembangan Koleksi
Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan



Andi Ariani, SE, M.Si
NIP. 19720414 199903 2 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. RATNIANGSA
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengawasan Kearsipan


Dra. RATNIANGSA
NIP. 19680713 199303 2 006



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan kearsipan</p> <p>Meningkatnya Jumlah Pembinaan SDM dan nilai hasil Pengawasan Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terdampinginya PD Provinsi dan LKD Kabupaten Kota dalam Penyelenggaraan Kearsipan</i> - <i>Terbimbingnya pengelola Arsip PD Provinsi dan LKD Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan Kearsipan</i> - <i>Terbinanya ORMAS, ORPOL, BUMD, PERUSAHAAN dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kearsipan</i> <p>Meningkatnya nilai hasil Pengawasan Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terawasinya PD Instansi, LKD Kab/Kota Kelompok Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Penyelenggaraan Kearsipan</i> <p>Meningkatnya pengawasan pemanfaatan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terawasinya PD Provinsi dan LKD Kab/Kota, Kel Masy dan Kel Usaha dalam Pemanfaatan simpul jaringan</i> 	<p>Persentase perangkat daerah berkategori baik dalam pengelolaan arsip</p> <p>Jumlah LKD, OPD/Instansi yang mendapatkan Workshop, Bimtek, Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Perangkat Daerah, LKD Kabupaten Kota yang terdampingi .</i> - <i>Jumlah Pengelola Arsip Perangkat Daerah, LKD Kabupaten Kota yang terbimbing</i> - <i>Jumlah Kelompok</i> <p>Jumlah LKD, OPD/Instansi yang mendapatkan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah PD Instansi, LKD Kab/Kota, Kelompok Masyarakat dan Kelompok Usaha yang diawasi dalam penyelenggaraan kearsipan</i> <p>Persentase PD Instansi, LKD Kab/Kota ,Kelompok Masy, Kelompok Usaha yang terawasi dalam Pemanfaatan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Perangkat</i> 	<p style="text-align: center;">16 %</p> <p>61 Instansi</p> <p style="text-align: center;">61 Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">61 Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">18 Kelompok</p> <p>61 Instansi</p> <p style="text-align: center;">61 Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">79 Perangkat</p>

Program	Anggaran
Pengelolaan Arsip	Rp. 350.161.300,00
Kegiatan	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp. 175.968.000,00
Sub Kegiatan	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Rp. 175.968.000,00
Kegiatan	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp. 174.193.300,00
Sub Kegiatan	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp. 174.193.300,00

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I Nyoman Sriadijaya, M.M.
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang
Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan



Dra. Ratniangsa
NIP. 19680713 199303 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARGIE LESTARI, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, M.M
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Arsip


MARGIE LESTARI, S.H.
NIP. 19740324 200212 2 012



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Arsip Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Lkd Dan Opd/Instansi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terbinanya perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dinamis</i> <p>Meningkatnya arsip statis yang di autentikasi dan arsip hasil alih media sesuai standar kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terbinanya Perangkat Daerah/Instansi Dalam Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis Dan Autentifikasi</i> - <i>Tersedianya Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai dengan NSPK dan SDM Kearsipan i</i> <p>Meningkatnya Pelaksanaan Pengumpulan Dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada Anrl</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terbinanya Perangkat Daerah Dan Lkd Dalam Pengelolaan Arsip Terjaga</i> - <i>Terdata dan teridentifikasinya arsip terjaga pada PD dan LKD KAB/KOTA</i> <p>Meningkatnya Kualitas Akuisisi Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terakuisisinya Arsip Statis Opd/Lkd</i> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Daerah Provinsi Melalui JIKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tersedianya Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN</i> - <i>Terdampinginya PD dan LKD dalam pengelolaan arsip Daerah Provinsi Melalui JIKN</i> 	<p>Persentase Kualitas Layanan Arsip Yang Terkelola</p> <p>Persentase Perangkat Daerah/Instansi Yang Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah perangkat daerah, LKD/Instansi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan.</i> <p>Persentase arsip statis yang di autentikasi dan hasil alih media sesuai standar kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Perangkat Daerah /Instansi Yang Dibina Dalam Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis Dan Autentifikasi</i> - <i>Tingkat kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan SDM Kearsipan</i> <p>Persentase Jumlah Jenis Arsip Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Perangkat Daerah Dan Lkd Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Arsip Terjaga</i> - <i>Jumlah PD dan LKD KAB/KOTA yang terdata dan teridentifikasi arsip terjaganya</i> <p>Persentase Arsip Statis Yang Diakuisisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Opd/Lkd Yang Arsip Statisnya Diakuisisi</i> <p>persentase layanan penyediaan informasi , Akses Dan layan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN yang terlayani</i> - <i>Jumlah PD dan LKD yang terdampingi</i> 	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">40 %</p> <p style="text-align: center;">45 OPD/LKD</p> <p style="text-align: center;">40 %</p> <p style="text-align: center;">19 OPD/LKPD</p> <p style="text-align: center;">19 OPD/LKPD</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">20 Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">20 OPD/LKD</p> <p style="text-align: center;">63 OPD/LKPD</p> <p style="text-align: center;">44 OPD/LKPD</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">13 OPD/LKPD</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas Penilaian, Penetapan, Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar Arsip hasil Penilaian , Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun 	Persentase Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Sesuai Standar Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Arsip hasil Penilaian, penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun 	100 % 100 %
	Meningkatnya Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana sesuai NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Arsip Statis hasil Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 	Persentase Tingkat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Arsip hasil Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 	100 % 150 Arsip
	Meningkatnya Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar Arsip hasil Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi 	Persentase tingkat kesesuaian penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK) <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Daftar Arsip hasil Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi 	100 % 7 Daftar
	Meningkatnya Autentifikasi arsip statis sesuai dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Arsip Hasil Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip 	Persentase kesesuaian autentifikasi arsip statis dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Arsip Hasil Penilaian Dan Penetapan Autentisitas sesuai Penjaminan Keabsahan Arsip 	100 % 150 Arsip
	Meningkatnya Autentifikasi arsip hasil alih media sesuai dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar Arsip hasil Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 	Persentase kesesuaian dan arsip hasil alih media dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Daftar Arsip hasil Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip) 	100 % 7 Daftar
	Meningkatnya Penilaian, Penetapan Dan Autentisitas Statis Arsip Opd/Lkd Yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian Dan Penetapan <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Arsip Statis hasil Penilaian, Penetapan Autentisitas Arsip Yang dinyatakan hilang 	Persentase Penilaian, Penetapan Dan Autentisitas Statis Arsip Opd/Lkd Yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian Dan Penetapan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Arsip Statis hasil Penilaian, Penetapan Autentisitas Arsip Yang dinyatakan hilang 	100 % 100 Arsip
	Meningkatnya Penetapan arsip hasil alih media arsip statis yang dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar Arsip hasil Penilaian dan Penetapan Alih Media yang dinyatakan Hilang 	Persentase kesesuaian arsip hasil alih media arsip statis yang dinyatakan hilang Yang dilakukan Evaluasi dan Penetapan sesuai dengan NSPK <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Daftar Arsip hasil Evaluasi dan Penetapan Alih Media Yang dinyatakan Hilang 	100 % 7 Daftar
	Meningkatnya Kualitas Penetapan Daftar Pencarian Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar Arsip Hasil DPA 	Persentase kesesuaian Arsip yang dilakukan Penetapan dalam Daftar Pencarian Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Daftar Pencarian Arsip Yang dilakukan Penetapan Dan Pengumuman 	100 % 7 Daftar

Program	Anggaran
Pengelolaan Arsip	Rp. 159.986.300,00
Kegiatan	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp. 316.558.800,00
Sub Kegiatan	
Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Rp. 250.467.900,00
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Rp. 66.090.900,00
Kegiatan	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp. 36.624.000,00
Sub Kegiatan	
Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Rp. 19.400.000,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis.	Rp. 17.224.000,00
Kegiatan	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provins	Rp. 96.139.000,00
Sub Kegiatan	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Rp. 96.139.000,00
 Program	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 115.140.250,00
Kegiatan	
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp. 26.994.848,00
Sub Kegiatan	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp. 26.994.848,00
Kegiatan	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Rp. 41.590.000,00
Sub Kegiatan	
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Rp. 41.590.000,00
Kegiatan	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.554.750,00
Sub Kegiatan	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Rp. 27.554.750,00
Kegiatan	
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Rp. 23.222.000,00

Sub Kegiatan

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp. 17.724.000,00
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp. 5.498.000,00

Kegiatan

Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Rp. 31.305.150,00
--	-------------------

Sub Kegiatan

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp. 16.873.950,00
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Rp. 4.999.500,00
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp. 9.431.700,00

Palu, 13 Juni 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I Nyomar Sriadijaya, M.M.
NIP. 19640919 199003 1 009

Kepala Bidang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip



Margie Lestari, SH
NIP. 19740324 200212 2 012



Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Poso



Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Poso



Stan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah di EXPO SULTENG 2024 bersama Kepala Dinas I Nyoman Sriadijaya, MM dan Bapak Gubernur Rusdy Mastura

1. Pendongeng sedang memberikan story telling pada anak-anak tk yang sedang berkunjung, story telling adalah salah satu kegiatan layanan yang dilaksanakan seminggu sekali



2. Sulteng Expo



3. Layanan Perpustakaan Keliling



4. Bulkloan System



5. Layanan Hari Sabtu



6. Stock Opname



7. Haul Guru Tua



DOKUMENTASI KEGIATAN

SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA MASYARAKAT (APARAT DESA) DI KAB.POSO



BIMTEK AKREDITASI SECARA VIRTUAL 13 KABUPATEN/KOTA



BIMTEK AKREDITASI PERPUSTAKAAN SECARA VIRTUAL TINGKAT SMA SEDERAJAT SE-SULTENG



RAPAT TIM SINERGI TW I



SOSIALISASI DAN BIMTEK TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KAB. BANGGAI KEPULAUAN



WORKSHOP LITERASI PARENTING DARI IBU UNTUK KELUARGA DI KAB. BANGGAI KEPULAUAN



LOMBA BERTUTUR SD/MI TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH



SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN BERDASARKAN PERMENPAN



WORKSHOP LITERASI PARENTING DARI IBU UNTUK KELUARGA DI KAB. BANGGAI LAUT



RAPAT TIM SINERGI TW II



SOSIALISASI DAN BIMTEK TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KAB. MOROWALI



RAPAT TIM SINERGI TW III



GATHERING LITERASI PERPUSTAKAAN



WORKSHOP LITERASI PARENTING DARI IBU UNTUK KELUARGA DI KOTA PALU



PEMILIHAN DUTA BACA



**PRA AKREDITASI PERPUSTAKAAN SATUAN PENDIDIKAN UMUM
KHUSUS DAN DESA/KELURAHAN**



PEER LEARNING MEETING (PLM) PROVINSI



**SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA MASYARAKAT
(APARAT DESA) PARIGI MOUTONG**



WORKSHOP LITERASI PARENTING DARI IBU UNTUK KELUARGA DI KAB.DONGGALA



BIMTEK PRA AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



RAPAT TIM SENERGI TW IV



**WORKSHOP LITERASI PARENTING DARI IBU UNTUK KELUARGA DI
KAB.PARIGI MOUTONG**



1. KEGIATAN PEMBINAAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI KABUPATEN DONGGALA



2. KEGIATAN PEMBINAAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI KOTA PALU



3. KEGIATAN PENGOLAHAN BUKU APBD 2024



❖ Kegiatan Pameran EXPO HUT Provinsi 2024



❖ Kegiatan Layanan Deposit Hari Sabtu



❖ Kegiatan Stock Opname Koleksi Deposit



❖ Kegiatan Penjemputan Hasil Penghimpunan KCKR Terbitan Sulawesi Tengah









❖ **Konsultasi Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Daerah di Jakarta**



❖ Kegiatan Konsultasi/Rapat Koordinasi Karya Cetak Karya Rekam Terbitan Daerah/ Nasional di Jakarta



❖ Kegiatan Magang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Daerah di Jakarta





KEGIATAN BIMTEK PELESTARIAN/ PERBAIKAN BAHAN PERPUSTAKAAN BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN SMA/SMK/MA UNTUK KABUPATEN BANGGAI, BANGGAI KEPULAUAN DAN BANGGAI LAUT OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI LUWUK BANGGAI



(RAPAT KOORDINASI BIDANG PEPRUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DI KABUPATEN POSO)



(RAPAT KOORDINASI BIDANG PEPRUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DI KABUPATEN POSO)



(WORKSHOP PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN LKD PROVINSI SULTENG)



(WORKSHOP PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN LKD PROVINSI SULTENG)



(PEMBINAAN KEARSIPAN PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROV.SULTENG)



(PEMBINAAN KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH PROV. SULTENG)



(PEMBINAAN KEARSIPAN PADA BUMD, ORMAS/ORPOL, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT)



(PENGAWASAN KEARSIPAN PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROV. SULTENG)



Vivo V17 Pro
48MP AI QUAD CAMERA

2024.10.24 10:48

(PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH PROV.SULTENG)

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SRIKANDI VERSI 3



**KEGIATAN KAMPANYE SADAR TERTIB ARSIP
DAN MENGALIH MEDIA ARSIP BAGI PENGELOLA ARSIP SMA/SMK/PD**



KEGIATAN SADAR TERTIB ARSIP BAGI ORMAS/ORPOL



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Belanja Program/Kegiatan	Volume	Sumber Dana (DBH, DAU, DAK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Jumlah Anggaran	Realisasi			Ket
							Keuangan	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Belanja Operasi					21.012.618.913,23	18.509.586.872,87	88,09	100,00	
	Belanja Pegawai					12.707.419.765,23	10.408.809.917,00	81,91	100,00	
prog	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					12.692.419.765,23	10.393.809.917,00	81,89	100,00	
keg	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.692.419.765,23	10.393.809.917,00	81,89	100,00	
sub.keg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	12.518.599.765,23	10.225.419.917,00	81,68	100,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	173.820.000,00	168.390.000,00	96,88	100,00	
prog	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	
keg	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	
sub.keg	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	12 Bulan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa					8.305.199.148,00	8.100.776.955,87	97,54	100,00	
prog	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					4.500.648.838,00	4.418.470.988,87	98,17	100,00	
keg	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					403.501.150,00	391.400.688,00	97,00	100,00	
sub.keg	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab.Morowali, Morowali Utara, Donggala, Parigi Moutong, Banggai, Poso, Tojo Una-Una, D.K.I Jakarta	353.805.850,00	342.067.938,00	96,68	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	17.565.950,00	17.556.350,00	99,95	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	15.915.350,00	15.779.150,00	99,14	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	5.064.500,00	5.056.100,00	99,83	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	11.149.500,00	10.941.150,00	98,13	100,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.800.000,00	41.230.000,00	98,64	100,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	PAD	TW IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	PAD	TW II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	31.800.000,00	31.230.000,00	98,21	100,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					215.859.750,00	209.887.050,00	97,23	100,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	PAD	TW III	D.K.I. Jakarta	50.100.000,00	46.027.120,00	91,87	100,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	PAD	TW I, II	Kota Palu, Kab.Poso	17.869.750,00	17.869.750,00	100,00	100,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Morowali, Kab. Banggai, Kab. Tolitoli	147.890.000,00	145.990.180,00	98,72	100,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					34.745.000,00	34.745.000,00	100,00	100,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	PAD	TW III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	34.745.000,00	34.745.000,00	100,00	100,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					706.034.310,00	692.714.252,00	98,11	100,00	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 Paket	PAD	TW I, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	185.459.360,00	185.459.360,00	100,00	100,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	PAD	TW I, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	48.033.900,00	48.033.900,00	100,00	100,00	

No	Belanja Program/Kegiatan	Volume	Sumber Dana (DBH, DAU, DAK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Jumlah Anggaran	Realisasi			Ket
							Keuangan	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	26.345.000,00	26.076.250,00	98,98	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta, Poso, Banggai, Banggai Laut, Tojo Una-Una	446.196.050,00	433.144.742,00	97,07	100,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.987.500,00	0,00	0,00	100,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	PAD	TW IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	2.987.500,00	0,00	0,00	0,00	tidak diadakan
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.097.408.170,00	2.080.644.677,00	99,20	100,00	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	445.869.840,00	438.691.985,00	98,39	100,00	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	1.651.538.330,00	1.641.952.692,00	99,42	100,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					998.312.958,00	967.849.321,87	96,95	100,00	
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	142.800.000,00	142.800.000,00	100,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	125.550.000,00	124.241.735,00	98,96	100,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	70.760.000,00	70.760.000,00	100,00	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	561.416.550,00	532.261.178,87	94,81	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Unit	PAD	TW II, III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	97.786.408,00	97.786.408,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					2.274.236.288,00	2.225.594.599,00	97,86	100,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					1.025.225.088,00	1.009.423.037,00	98,46	100,00	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	1 Perpustakaan	PAD	TW I, II, IV	D.K.I. Jakarta	57.084.300,00	54.189.040,00	94,93	100,00	
	Pembinaan Perpustakaan Pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	13 Perpustakaan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Banggai, Poso, Morowali Utara, Parigi Moutong, Touna, Tolitoli	191.601.710,00	188.251.710,00	98,25	100,00	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	1 Dokumen	PAD	TW I, II	Kota Palu	3.143.410,00	3.143.410,00	100,00	100,00	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang	PAD	TW I, II, IV	D.K.I. Jakarta	153.260.300,00	150.788.557,00	98,39	100,00	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Layanan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tolitoli	339.535.080,00	334.305.960,00	98,46	100,00	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15 Perpustakaan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta, Kab. Poso, Kab. Buol	215.875.088,00	214.041.660,00	99,15	100,00	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Banggai Kepulauan, Buol, Morowali, Touna	64.725.200,00	64.702.700,00	99,97	100,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					1.249.011.200,00	1.216.171.562,00	97,37	100,00	
	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	1 Lokus	PAD	TW I, II, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta, Kab. Poso	332.253.150,00	315.914.235,00	95,08	100,00	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca	7 Orang	PAD	TW III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	70.997.600,00	65.963.980,00	92,91	100,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	11 Perpustakaan	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Sigi, Touna, Morowali, Tolitoli	320.949.200,00	315.156.740,00	98,20	100,00	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	1 Orang	PAD	TW II, III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta, Kab. Bangkep, Balut, Parigi	524.811.250,00	519.136.607,00	98,92	100,00	

No	Belanja Program/Kegiatan	Volume	Sumber Dana (DBH, DAU, DAK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Jumlah Anggaran	Realisasi			Ket
							Keuangan	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH					439.175.874,00	429.535.480,00	97,80	100,00	
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah					135.939.700,00	130.720.146,00	96,16	100,00	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	220 Eksemplar	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Tolitoli	135.939.700,00	130.720.146,00	96,16	100,00	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					105.499.003,00	101.770.163,00	96,47	100,00	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	67 Orang	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Banggai, Donggala, Poso, Sigi, D.K.I Jakarta	105.499.003,00	101.770.163,00	96,47	100,00	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					197.737.171,00	197.045.171,00	99,65	100,00	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	284 Eksemplar	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, Kab. Donggala	197.737.171,00	197.045.171,00	99,65	100,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					940.951.400,00	894.443.820,00	95,06	100,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					642.481.100,00	606.503.720,00	94,40	100,00	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	1600 Arsip	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta, Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Tolitoli	175.949.100,00	174.819.100,00	99,36	100,00	
	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	1600 Arsip	PAD	TW I, II, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta, Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Tolitoli	250.467.900,00	227.871.660,00	90,98	100,00	
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	PAD	TW I, II, III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	216.064.100,00	203.812.960,00	94,33	100,00	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					36.624.000,00	31.133.800,00	85,01	100,00	
	Pengumpulan dan Penyampaian salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	35 Arsip	PAD	TW II, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	19.400.000,00	14.256.000,00	73,48	100,00	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	235 Arsip	PAD	TW III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	17.224.000,00	16.877.800,00	97,99	100,00	
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					261.846.300,00	256.806.300,00	98,08	100,00	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3 Kabupaten	PAD	TW I, II, III, IV	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Buol	96.139.000,00	95.649.000,00	99,49	100,00	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	20%	PAD	TW I, II, IV	Kota Palu, Morowali, Morowali utara, Sigi,	165.707.300,00	161.157.300,00	97,25	100,00	

No	Belanja Program/Kegiatan	Volume	Sumber Dana (DBH, DAU, DAK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Jumlah Anggaran	Realisasi			Ket
							Keuangan	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					150.186.748,00	132.732.068,00	88,38	100,00	
	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					26.524.848,00	24.182.828,00	91,17	100,00	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1 Laporan	PAD	TW I, II, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	26.524.848,00	24.182.828,00	91,17	100,00	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					41.590.000,00	38.035.000,00	91,45	100,00	
	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Laporan	PAD	TW I, II, IV	Kota Palu, Kab. Tolitoli	41.590.000,00	38.035.000,00	91,45	100,00	
	Penyelamatan Asip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota					27.544.750,00	23.750.000,00	86,22	100,00	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1 Laporan	PAD	TW I, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	27.544.750,00	23.750.000,00	86,22	100,00	
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					23.222.000,00	20.998.000,00	90,42	100,00	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Laporan	PAD	TW IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	17.724.000,00	15.598.000,00	88,00	100,00	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Laporan	PAD	TW IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	5.498.000,00	5.400.000,00	98,22	100,00	
	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang					31.305.150,00	25.766.240,00	82,31	100,00	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	1 Laporan	PAD	TW III, IV	Kota Palu, D.K.I Jakarta	16.873.950,00	15.546.240,00	92,13	100,00	
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	1 Laporan	PAD	TW IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	4.999.500,00	4.500.000,00	90,01	100,00	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1 Laporan	PAD	TW IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	9.431.700,00	5.720.000,00	60,65	100,00	
	Belanja Modal					5.790.893.599,00	4.948.323.579,00	85,45	100,00	
prog	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					5.790.893.599,00	4.948.323.579,00	85,45	100,00	
keq	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.280.538.090,00	1.274.830.000,00	99,55	100,00	
sub.keg	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Meuble air, alat pendingin, Komputer unit, Peralatan Komputer lainnya	PAD/DAK	TW III, IV	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	1.080.469.290,00	1.077.880.000,00	99,76	100,00	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Buku	PAD/DAK	TW II, III	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	200.068.800,00	196.950.000,00	98,44	100,00	
keq	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					4.510.355.509,00	3.673.493.579,00	81,45	100,00	
sub.keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Gedung Layanan Perustakaan	PAD/DAK	TW II, III	Kota Palu, Palu Selatan, Birobuli Selatan	4.510.355.509,00	3.673.493.579,00	81,45	100,00	
	TOTAL					26.803.512.512,23	23.457.910.451,87	87,52	100,00	

Palu, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 010

No	Belanja Program/Kegiatan	Volume	Sumber Dana (DBH, DAU, DAK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Jumlah Anggaran	Realisasi			Ket
							Keuangan	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10

No	Belanja Program/Kegiatan	Volume	Sumber Dana (DBH, DAU, DAK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Jumlah Anggaran	Realisasi			Ket
							Keuangan	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 13 kabupaten/Kota. Hasil nilai IPLM pada perpustakaan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan pada tabel rekapitulasi berikut.

Tabel 51 Rekapitulasi UPLM Per Kab/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

PROVINSI/KAB/ KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,4278	0,4169	0,6682	0,5062	1,0000	1,0000	1,0000	71,70

...

PROVINSI/KAB/ KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Kab. Banggai Kepulauan	0,2399	0,7289	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	85,27
Kab. Banggai Laut	0,1938	0,2975	1,0000	0,1594	1,0000	0,3119	0,3057	46,69
Kab. Buol	0,6368	0,2406	0,8305	1,0000	1,0000	0,2113	1,0000	70,27
Kab. Donggala	0,3732	0,2152	0,2595	0,8511	1,0000	0,0362	1,0000	53,36
Kab. Morowali Utara	0,4517	0,8495	0,3173	0,1726	1,0000	0,5474	1,0000	61,98
Kab. Parigi Moutong	0,4406	0,2409	0,1100	0,0910	1,0000	0,0791	0,7926	39,35
Kab. Poso	0,4802	0,5049	0,2086	0,0276	1,0000	1,0000	1,0000	60,30
Kab. Sigi	0,5841	0,1502	0,6188	0,0572	1,0000	1,0000	0,9816	62,74
Kab. Toli Toli	0,3085	0,3375	0,5071	0,8994	1,0000	1,0000	1,0000	72,18
Kota Palu	0,6853	0,8026	1,0000	1,0000	1,0000	0,8891	1,0000	91,10
Kab. Banggai	0,3634	0,0236	0,5352	0,1036	1,0000	0,0102	1,0000	43,37
Kab. Morowali	0,3641	0,1804	0,5280	0,0370	1,0000	1,0000	1,0000	58,71
Kab. Tojo Una- Una	0,4037	1,0000	0,3254	0,0068	1,0000	0,6583	1,0000	62,78

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **71,70** dan masuk dalam kategori **Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Palu 91,10; Kab. Banggai Kepulauan 85,27; dan Kab. Toli Toli 72,18. Sedangkan tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Parigi Moutong 39,35; Kab. Banggai 43,37; dan Kab. Banggai Laut 46,69.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 beserta intepretasinya.

Jumlah Penduduk (BPS 2022)	3.086.740
Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)	687.438
Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)	107.765
Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)	7.509

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		71,70	Sedang
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,4278	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 43 persen dari standar
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,4169	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 42 persen dari standar
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,6682	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 67 persen dari standar
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	0,5062	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 51 persen dari standar
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	1,0000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
Keterangan Standar:			
UPLM1: Jumlah kelembagaan		UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan	
UPLM2: 2 x jumlah penduduk		UPLM6: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk		UPLM7: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM4: 2% dari jumlah penduduk			

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)		
	Jumlah perpustakaan :	3.293	
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum :	0,00019	Terdapat 20 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah :	0,00373	Terdapat 373 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan tinggi :	0,00039	Terdapat 39 perpustakaan per 100.000 civitas akademika
	d. Kekurangan perpustakaan untuk memenuhi standar :	4.297	Kekurangan perpustakaan sebanyak 4297 unit
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)		
	Jumlah koleksi perpustakaan :	2.573.653	
	a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan :	1 : 2	Setiap 1 koleksi dapat diakses oleh 2 penduduk
	b. Kekurangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi standar :	3.599.827	Kekurangan koleksi sebanyak 3599827 judul
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)		
	Jumlah tenaga perpustakaan :	825	
	a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan :	1 : 3742	Setiap 1 pustakawan harus melayani 3742 penduduk

b. Kekurangan tenaga perpustakaan untuk memenuhi standar :	410	Kekurangan tenaga perpustakaan sebanyak 410 orang
--	-----	---

4 Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)

Jumlah kunjungan masyarakat/hari :	31.250	
a. Persentase kunjungan masyarakat :	1,01%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 1,01 persen, belum ideal
b. Kekurangan kunjungan masyarakat per hari untuk memenuhi standar :	30.485	Kekurangan sebanyak 30485 pengunjung per hari

5 Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (UPLM5)

Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP :	1.614	
a. Persentase perpustakaan yang dibina sesuai SNP :	49,01%	Terdapat 49,01 persen perpustakaan yang dibina sesuai SNP
b. Kekurangan perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi standar :	0	Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

6 Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)

Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan :	106.425	
a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi & pemanfaatan perpustakaan :	3,45%	Terdapat 3,45 persen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan
b. Kekurangan masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan untuk memenuhi standar :	0	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

7 Anggota Perpustakaan (UPLM7)

Jumlah anggota perpustakaan :	376.952	
a. Persentase anggota perpustakaan :	12,21%	Terdapat 12,21 persen masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan
b. Kekurangan anggota perpustakaan untuk memenuhi standar :	0	Jumlah anggota perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

PROVINSI SULAWESI TENGAH	67,48	Sedang
Kab. Banggai Kepulauan	75,89	Tinggi
Kab. Banggai Laut	73,95	Sedang
Kab. Buol	63,71	Sedang
Kab. Donggala	67,69	Sedang
Kab. Morowali Utara	64,60	Sedang
Kab. Parigi Moutong	66,82	Sedang
Kab. Poso	71,30	Sedang
Kab. Sigi	69,09	Sedang
Kab. Toli Toli	66,16	Sedang
Kota Palu	71,92	Sedang
Kab. Banggai	56,41	Sedang
Kab. Morowali	60,53	Sedang
Kab. Tojo Una-Una	65,69	Sedang

Berdasarkan Tabel 38, nilai TGM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 67,48 dan masuk dalam sedang. Tiga kabupaten/kota dengan nilai TGM tertinggi yaitu Kab. Banggai Kepulauan 75,89; Kab. Banggai Laut 73,95; dan Kota Palu 71,92. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan nilai TGM terendah yaitu Kab. Banggai 56,41; Kab. Morowali 60,53; dan Kab. Buol 63,71.

Dimensi TGM	Nilai	Interpretasi
Nilai TGM Provinsi	67,48	Sedang
Frekuensi Membaca	72,87	Rata-rata frekuensi membaca per minggu yaitu 5-6 kali
Durasi Membaca	61,18	Rata-rata durasi membaca per hari yaitu 1 jam s.d 1 jam 59 menit
Jumlah Bahan Bacaan	67,13	Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 3-4 bahan bacaan
Frekuensi Akses Internet	76,19	Rata-rata frekuensi akses internet untuk membaca/mencari informasi per minggu yaitu 5-6 kali
Durasi Akses Internet	66,42	Rata-rata durasi akses internet untuk membaca/mencari informasi per hari yaitu 1 jam s.d 1 jam 59 menit

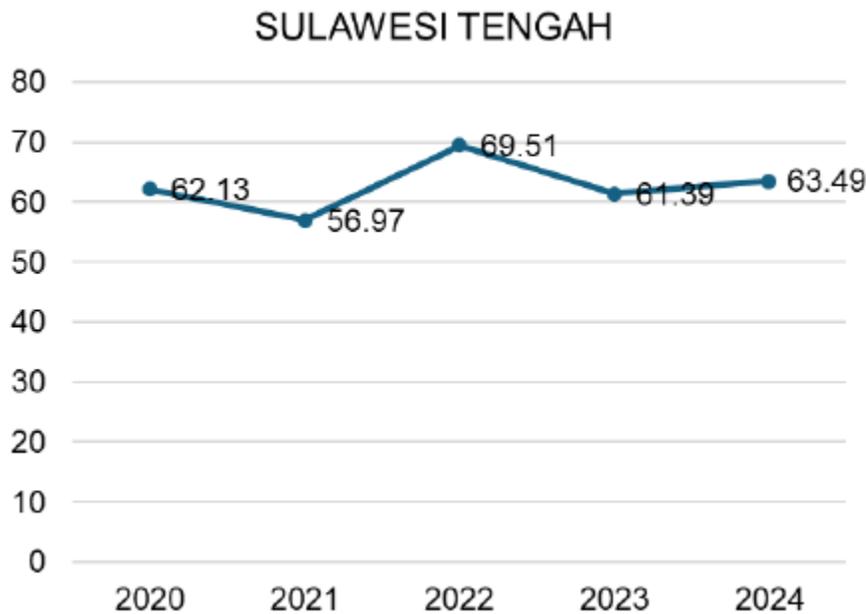
Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar **63,49 (enam puluh tiga koma empat sembilan)** atau kategori **“B (Baik)”** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	66,82	60%	40.09
Internal	58,50	40%	23,40
Nilai Akumulasi			63,49

Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **71,71 (tujuh puluh satu koma tujuh satu)** dengan kategori **“BB (Sangat Baik)”**.

Dalam kurun waktu RPJMN 2020-2024, kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. Sejak tahun 2021 kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi capaian kinerja berdasarkan hasil Audit Eksternal dengan bobot 60% dan Audit Internal 40%. Pada tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan *outcome* yang dihasilkan. Adapun gambaran kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



INOVASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

iPerpusSulteng adalah platform perpustakaan digital yang hadir sebagai upaya untuk membuat pemustaka dapat memperoleh akses informasi dengan lebih cepat dan mudah ke berbagai sumber informasi tanpa terikat oleh batasan geografis atau waktu.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DISPUSAKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SULAWESI TENGAH

BARAKHLAK bangga melayani bangsa **2024 INTEGRITAS**

IPUS SULTENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Ayo....
Download
Sekarang Juga!**

**KETENTUAN AKSES
KOLEKSI E-BOOK**

- ✓ Memiliki Akun pada IPusSulteng
- ✓ Unduh dan install aplikasi pada perangkat Android / IOS
- ✓ Mengisi permohonan akses IPusSulteng melalui nomor whatsapp yang tercantum
- ✓ Peminjaman buku di batasi 2 Judul
- ✓ Batas peminjaman buku 7 hari, majalah dan koran 1 hari (buku, majalah, koran otomatis akan hilang dari perpustakaan)
- ✓ Khusus Area Akses Wilayah Sulteng
- ✓ Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat berubah

Untuk dapat menggunakan layanan ini bisa daftar terlebih dahulu melalui :

0823 - 2022 - 2290 (WA Only)
Mengisi format Identitas Diri

IPusSulteng adalah layanan perpustakaan digital yang memberi akses kepada para masyarakat untuk meminjam dan membaca buku digital melalui perangkat smartphone secara cepat, dimana saja, kapan saja

SEBELUM MENDAFTAR DAN DIAKTIVASI OLEH PETUGAS, DOWNLOAD APP DI :

Download on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**

Link playstore (Android) : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eperpus.saas.otomasi123>

Link unduh (iOS) : <https://smartlib.gramedia.com/download/otomasi123>

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI :

0823 - 2022 - 2290

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
dispusakasulteng | dispusakasulteng_official

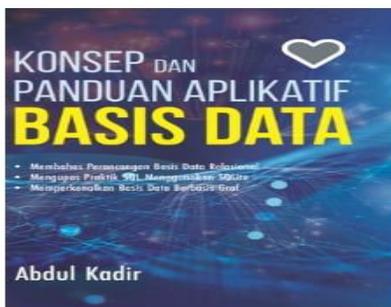
Kerjasama oleh : **Gramedia** | **Smart Library**

Selamat Membaca, Admin



Computers & Technology u...

Lihat Semua



Abdul Kadir
KONSEP DAN
PANDUAN APLIKAT...

★ 0.0



Adi Chandra Syarif, Alf...
Pengantar
Teknologi Informas...

★ 0.0



Dara Sawitri, Dede...
Pengantar Ilmu
Komputer: Peng...

★ 0.0

Buku Terpopuler

Lihat Semua



Beranda



Pencarian



Rak Saya

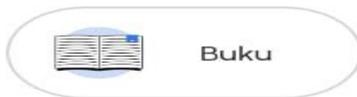
Pencarian



 Cari judul, penulis, atau penerbit

Media

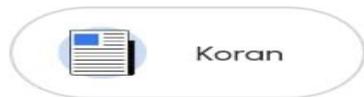
[Lihat Semua](#)



Buku



Majalah



Koran

Kategori dan Label

[Lihat Semua](#)



Adult Fiction



Art, Music & Photography



Biographies & Memoirs



Business & Investing



Children Age 4-7



Children Age 8-12



Christianity



Classics



Computers & Technology



Beranda

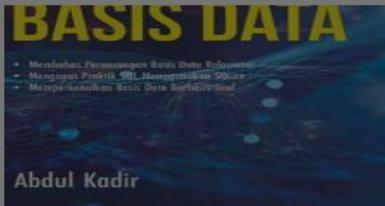


Pencarian



Rak Saya

Selamat Membaca, Admin



Sinopsis



Anak aneh di sekolah, wanita eksentrik di gedung apartemen, pria merepotkan di tempat kerja... Orang-orang seperti itu ada di mana-mana, dalam kehidupan semua orang. Hanya satu ucapan yang dibutuhkan untuk memulai segala kegilaan ini. Satu pertanyaan meresahkan, satu